

KOMUNIKASI POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Da'wah Politik Partai Keadilan
Daerah Istimewa Yogyakarta)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh:
YADI KURNIADI
NIM. 96212144

**FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

KOMUNIKASI POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Da'wah Politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta)

YADI KURNIADI
NIM 96212144

Rezim Orde Baru dengan system kepolitikan hegemonik, otoriter, totaliter dan refresif telah menimbulkan realitas baru berupa ketegangan dan akumulasi kekecewaan terhadap sistem yang dibangun olehnya. Pengekangan terhadap berbagai bentuk aspirasi politik masyarakat ternyata telah berubah dengan munculnya berbagai sarana dan media baru sebagai alat penyampaian aspirasi. Salah satunya dengan munculnya berbagai macam partai politik yang beraneka ragam asas dan basik idiologisnya.

Partai Keadilan merupakan partai baru yang didirikan oleh kalangan yang mempunyai latar belakang sebagai aktivis da'wah, terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia. Partai yang berasaskan Islam ini telah menetapkan da'wah sebagai metode dalam perjuangan politiknya. Asumsi dasar yang menjadi landasan filosofis partai ini bahwa manusia sebagai khalifah Allah di bumi tidak mungkin mengelak dari tanggungjawabnya melaksanakan misi khalifah yaitu memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas politik yang paling otentik.

Kaitannya dengan dakwah politik Partai Keadilan, DPW Partai Keadilan DIY barangkali dapat dijadikan barometer Partai Keadilan secara nasional, mengingat DPW Partai Keadilan DIY sarat nuansa komunikasi yang unik dalam penyampaian program-program politiknya. Ini terlihat dari banyaknya simpati, harapan dan dukungan masyarakat terhadap partai. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan DPW DIY dan bagaimana unsur-unsur komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Keadilan DPW DIY.

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penetapan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dengan menggunakan kriteria antara lain kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Kata kunci: komunikasi Islam, dakwah politik, Partai Keadilan.

Drs. Aziz Muslim, M.Pd.
Dosen Fakultas Dakwah
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi saudara
Yadi Kurniadi

Kepada
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahannya serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya mengenai isi pembahasan skripsi saudara:

N a m a : Yadi Kurniadi
N I M : 96212144
Fakultas : Dakwah
J u d u l : KOMUNIKASI POLITIK ISLAM (STUDI ANALISIS
DA'WAH POLITIK PARTAI KEADILAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA).

Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Dakwah pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikianlah harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2001
Pembimbing



Drs. Aziz Muslim, M.Pd.
NIP. 150 267 221

PENGESAHAN

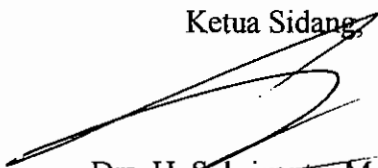
Skripsi Berjudul:
KOMUNIKASI POLITIK ISLAM
(Studi Analisis Da'wah Politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta)
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

YADI KURNIADI

NIM : 96212144

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal 3 Juli 2001
dan telah memenuhi syarat untuk diterima
Sidang Dewan Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Drs. H. Sukriyanto, M.Hum.

NIP. 150 088 689

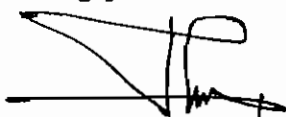
Sekretaris Sidang,



Drs. Hamdan Daulay, M.Si

NIP. 150 269 255

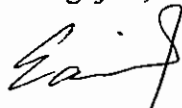
Penguji I/ Pembimbing,



Drs. Aziz Muslim, M.Pd.

NIP. 150 267 221

Penguji II,



Drs. H.M. Wasyim Bilal

NIP. 150 169 830

Penguji III,



Drs. M. Husen Madhal

NIP. 150 179 408

Yogyakarta, 3 Juli 2001

IAIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah

Dekan,



Drs. H. Sukriyanto, M.Hum.

NIP. 150 088 689

MOTTO

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

*Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir.
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan).^{*)}*

Orang bijaksana akan menjadi Majikan dari Pikirannya

Orang Bodoh akan menjadi Budaknya.

(David J. Schwartz, The Magic of Thinking Big, p. 420)

^{*)} Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1992), hal. 1061.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ☒ Ayah Bunda tercinta ☒*
- ☒ Guru-Guruku terhormat ☒*
- ☒ Adik tercinta Nunung Nurhayati ☒*
- ☒ Dian Onem Hendarti ☒*
- ☒ Dulur-Dulur di Galuh Rahayu ☒ .*
- ☒ Almamaterku kampus putih tercinta ☒*

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَاتَمِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبَعَ سُنَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

Segala puji syukur dan sanjungan penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., segenap keluarga beserta sahabatnya.

Namun demikian penulis menyadari bahwa terlaksananya penelitian dan tersusunnya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-staf nya.
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu dalam pendidikan kami di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Aziz Muslim, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan baik hati memberikan saran, koreksi serta bimbingan sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Partai Keadilan DPW Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk kegiatan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Cahyadi Takariawan, S.Si., Apt. selaku Wakil Ketua Partai Keadilan DPW Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai mengenai berbagai persoalan da'wah politik Partai Keadilan.

6. Bapak Agus Purnomo, S.IP., selaku Ketua Deputy Politik dan Hukum DPW DIY yang telah memberikan segala informasi dan data yang diperlukan.
7. Rekan-rekan Pengurus KPM “Galuh Rahayu” Ciamis-Yogyakarta: Didi AM, Dodi, Denis, Reza Irdania, Harly AR, serta “dulur-dulur” yang tidak mungkin disebutkan semuanya.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga menjadi amal sholeh serta bermanfaat bagi penulis. Amin. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan terhadap khazanah intelektual Islam.

Yogyakarta, 10 Juni 2001

Penyusun,



Yadi Kurniadi

NIM. 96212144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	i
a. Penegasan Judul	1
b. Latar Belakang Masalah	4
c. Perumusan Masalah	6
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
e. Kerangka Teoritik	8
1. Tinjauan Tentang Komunikasi Politik	8
2. Tinjauan Tentang Da'wah Politik	16
3. Hubungan Antara Komunikasi Politik dan Da'wah Politik	25
g. Metodologi Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM PARTAI KEADILAN DPW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	33
a. Sejarah Pembentukan Partai Keadilan	33
b. Struktur Organisasi Partai Keadilan	39
c. Visi dan Misi Partai Keadilan DPW DIY	47
d. Platform Partai Keadilan DPW DIY	48

BAB III	KOMUNIKASI DA'WAH POLITIK PARTAI KEADILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	59
a.	Unsur-unsur Komunikasi Da'wah Politik Partai Keadilan	60
1.	Pengurus Partai sebagai Sumber (Komunikator) Komunkasi Da'wah Politik Partai Keadilan	60
2.	Saluran Komunikasi Da'wah Politik Partai Keadilan	64
3.	Materi Komunikasi Da'wah Politik Partai Keadilan	66
4.	Khalayak Komunikasi Da'wah Politik Partai Keadilan	78
b.	Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik Partai Keadilan DPW DIY.....	80
1.	Propaganda Da'wah Politik	80
2.	Persuasi Da'wah Politik	82
3.	Tabligh Akbar sebagai Bentuk Da'wah Politik	83
4.	Periklanan Da'wah Politik	84
BAB IV	KESIMPULAN	85
a.	Kesimpulan	85
b.	Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO	JENIS	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.	Tabel I.	Jumlah DPD, DPC, dan DPRa PK DIY	36
2.	Tabel II	Data hasil PEMILU 1999 PK DPW DIY	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan penafsiran terhadap judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan pengertian berupa penegasan arti kata-kata yang terkandung dalam judul di atas.

1. Komunikasi Politik Islam

a. Komunikasi

Komunikasi¹ adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), atau perilaku (*behaviour*) baik secara langsung maupun tak langsung melalui media.²

Jadi komunikasi yang dimaksud di sini yaitu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh organisasi Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk disampaikan kepada orang lain (khalayak) untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang dilakukan melalui media.

¹ . Komunikasi berasal dari kata "*communicare*" yang dalam bahasa Latin mempunyai arti "berpartisipasi" atau berasal dari kata "*commoness*" yang berarti sama (*common*). (lihat Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, cet. II, 1997) hal. 1.

² Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung:Remadja Rosda Karya, cet. II, 1992), hal. 5.

b. Politik

Politik (*politics*) adalah kebijakan; cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).³ Pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu.⁴

Sementara **Joyce Mitchell** dalam bukunya "*Political Analysis and Public Policy*" seperti dikutip **Meriam Budiarjo**, mendefinisikan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.⁵

Jadi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh partai politik menyangkut dan berhubungan dengan kepentingan umum (keputusan yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, sosial, dan keagamaan).

2. Da'wah Politik

Secara etimologis da'wah berasal dari bahasa Arab yang berarti *seruan, ajakan, panggilan*.⁶ Sedangkan secara terminologis da'wah adalah

³ . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, cet. II, 1989), hal. 694.

⁴ . Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, cet. VII, 1982), hal 8.

⁵ . *Ibid*, hal. 11.

⁶ . Toto Tasmara, *Ibid*, hal. 31.

penyampaian pesan-pesan tertentu berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.

Da'wah dapat diartikan secara luas yaitu penjabaran, penterjemahan, dan pelaksanaan Islam dalam perikehidupan dan penghidupan manusia (termasuk di dalamnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan sebagainya).⁷

Da'wah politik dimaksud dalam penelitian ini adalah penjabaran, penterjemahan dan pelaksanaan ajaran Islam dalam sebuah sistem politik (Partai Keadilan).

Dari beberapa pengertian kata-kata di atas, dan maksud dari judul ***Komunikasi Politik Islam (Studi Analisis Da'wah Politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta)*** adalah upaya untuk melakukan analisis atas komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai proses da'wah yakni transformasi nilai-nilai keislaman dan politik keummatan melalui media (baik tulis, lisan, aksi sosial, (langsung maupun tidak langsung) terhadap anggota Partai Keadilan atau masyarakat secara keseluruhan.

⁷ . E. S. Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam*, (Jakarta:Penerbit Usaha Interprises, 1976), hal. 87.

B. Latar Belakang Masalah

Munculnya tuntutan reformasi telah membawa perubahan total dan iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Kungkungan politik selama rezim orde baru – menurut **Dr. Riswandha Imawan** disebut sistem kepolitikan hegemonik⁸ – telah menimbulkan realitas baru berupa ketegangan dan akumulasi kekecewaan terhadap sistem yang dibangun oleh rezim otoriter, totaliter, refresif ini. Pengekangan terhadap berbagai bentuk aspirasi politik masyarakat, ternyata telah berubah dengan munculnya berbagai sarana dan media baru sebagai alat penyampaian aspirasi. Salah satunya dengan munculnya berbagai macam partai politik yang beraneka ragam asas dan *basic* idiologisnya.

Perubahan tersebut tentunya membawa implikasi positif terhadap sistem komunikasi politik nasional. Saluran dan media komunikasi yang membawa nilai-nilai budaya, simbol-simbol, keyakinan, dan sikap menjadi dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini akan berakibat – meminjam istilahnya **Novel Ali** – melemahnya supra-struktur dan kuatnya dukungan infra-struktur yang ada.⁹

Komunikasi politik (da'wah politik) dalam konteks ke-Indonesiaan sebenarnya merupakan proses pengembalian humanisme masyarakat yang telah lama terkondisikan dalam suasana fatalistik. Da'wah politik diartikan sebagai

⁸ . Riswandha Imawan, *Kampanye Tanpa Huru-Hara*, (Jurnal ISKI Vol. IV, 1999), hal. 44.

⁹ . Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 1999), hal. 135.

gerakan pembebasan dari eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam sebuah sistem politik

Berbagai bentuk apresiasi prinsip-prinsip yang telah dilakukan oleh ummat Islam salah satunya melalui pembentukan partai politik yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Salah satunya adalah Partai Keadilan¹⁰ yaitu partai baru yang didirikan oleh kalangan yang mempunyai latar belakang sebagai aktivis da'wah, terutama yang tersebar di mesjid-mesjid kampus di Indonesia. Partai yang berasaskan Islam ini telah menetapkan da'wah sebagai metode dalam perjuangan politiknya.¹¹ Asumsi dasar yang menjadi landasan filosofis partai ini bahwa manusia sebagai *khalifah* Allah di bumi, tidak mungkin mengelak dari tanggungjawabnya melaksanakan misi *khalifah*, yaitu memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas politik yang paling otentik.¹²

Munculnya Partai Keadilan sebagai partai da'wah dalam kancah perpolitikan nasional telah menjadi perhatian masyarakat luas. Sehingga para pakar politik dan masyarakat luas memperkirakan partai ini akan masuk 7 besar dalam pemilu.

¹⁰ . Partai Keadilan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 yang dihadiri 50.000 pendukungnya di lapangan luas mesjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nama keadilan dipilih karena merupakan sunnah kauniyah yang menjadi ciri alamiah segala sesuatu. Keadilan juga sebagai salah satu prinsip dan doktrin politik Islam yang menegaskan tentang kesatuan manusia. (lihat, Nur Mahmudi Ismail, *Jati Diri Partai Keadilan dalam Memilih Partai Islam, Visi, Misi, dan Persepsi* dengan Sahar L. Hassan dkk. (ed.), , (Jakarta:Gema Insani Press, 1998), hal. 38.

¹¹ . *Ibid.* Hal. 32.

¹² . *Ibid.* hal. 33

1999.¹³ Ini tentunya cukup menarik untuk dikaji, karena partai yang berasaskan Islam ini mengklaim sebagai partai da'wah. Oleh karena itu tentunya segala aktivitas dan kegiatannya tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip yang dianutnya.

Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu DPW untuk tingkat wilayah Yogyakarta dapat dijadikan barometer Partai Keadilan secara Nasional. DPW Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta sarat nuansa komunikasi yang unik dalam penyampaian program-program politiknya. Ini terlihat dari banyak simpati, harapan, dan dukungan masyarakat terhadap partai ini.

Program-program variatif Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang sifatnya kampanye politik (dalam bentuk tabligh akbar), pendidikan politik (pelatihan dan pengajian-pengajian), persuasi politik melalui media tulis dilakukan dengan komunikatif. Sehingga dalam kerangka inilah perlu adanya sebuah kajian, penelitian yang cukup mendalam. Penelitian komunikasi politik ini akan mengarah pada bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ . Hairus Salim (penyunting), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, (Yogyakarta:LKiS, 1999), hal. V.

1. Bagaimana unsur-unsur komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta?.
2. Bentuk-bentuk komunikasi politik seperti apa yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta?.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Studi ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Menguraikan secara mendalam unsur-unsur komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mendeskripsikan secara analisis bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi keilmuan khususnya di bidang komunikasi dalam mengembangkan khasanah ilmu da'wah (komunikasi).
2. Dengan penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Politik

a. Pengertian Komunikasi Politik

Zulkarimein Nasution menjelaskan tentang pengertian komunikasi politik dengan mengutip beberapa pendapat sebagai berikut:

1. **Fagen (1966)** mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya.
2. **Muller (1973)** merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (*political outcomes*) dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi¹⁴.
3. **Galnoor (1980)** mendefinisikan komunikasi politik sebagai infrastruktur politik, yaitu suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.
4. **Almond dan Powell** mengartikan komunikasi politik sebagai suatu fungsi sistem yang mendasarkan (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik.¹⁴

Kedua rumusan terakhir di atas ternyata telah menempatkan komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama dengan fungsi-fungsi yang lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik.

Berbeda dengan para pakar komunikasi politik di atas, **Dan Nimmo** mendefinisikan komunikasi politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya

¹⁴. Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hal. 24.

(aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik (*"communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict"*).¹⁵

Komunikasi politik dalam penelitian ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam sistem politik. Ia bisa berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari penguasa politik bagi rakyat banyak ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik.

b. Lingkup Studi Komunikasi Politik

Untuk memasukkan lingkup studi komunikasi politik dalam sebuah sistem politik, tentu perlu merumuskan kerangka kajian yang dapat dijadikan sebagai patokan. Lingkup studi komunikasi politik seperti diuraikan oleh **Zulkarimein Nasution** dengan mengutip beberapa pendapat antara lain:

1. Menurut **Fagen (1966)** lingkup studi komunikasi politik yaitu setiap aktivitas komunikasi yang memuat pertimbangan bersifat politis dalam arti implikasinya bagi sistem politik.
2. **Almond dan Powell (1966)** merumuskan lingkup studi komunikasi politik pada:
 - a) Arus informasi yang paling umum dan signifikan dalam sistem politik

¹⁵ . Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, alih bahasa Tjun Surjaman, (Bandung: Remadja Rosda Karya, cet. II, 1993), hal. 9.

- b) Struktur-struktur yang menampilkan aktivitas-aktivitas komunikasi politik dan dapat diperbandingkan serta di analisis
- c) Implikasi penampilan fungsi komunikasi terhadap fungsi-fungsi politik
- d) Analisis terhadap penyampaian fungsi komunikasi oleh berbagai struktur dan dengan berbagai macam cara. Juga dapat mengemukakan masalah endemik yang dihadapi oleh bermacam-macam sistem dalam memelihara dan mempertahankan tingkat penampilan yang bersifat publik.¹⁶

Uraian lebih jelas dikemukakan oleh **Dan Nimmo (1989)** seperti dikutip **Novel Ali** menjelaskan lingkup studi komunikasi politik meliputi unsur komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik.¹⁷

c. Komponen-Komponen Komunikasi Politik

1) Komunikator Politik

Komunikator¹⁸ dalam komunikasi politik adalah pihak yang memprakarsai (yang bertindak sebagai sumber) penyampaian kepada pihak lain. Komunikator dalam komunikasi politik sama seperti komunikator dalam peristiwa komunikasi lainnya. Komunikator

¹⁶ . Zulkarimein Nasution, *Ibid*, hal. 26-27.

¹⁷ . Novel Ali, *Ibid*, hal 133.

¹⁸ . Komunikator dalam istilah komunikasi sering disebut sebagai *source*, *encoder*, *sender* atau *actor*. Menurut **Blake** dan **Haroldsen** seperti dikutip Zulkarimein Nasution, bahwa komunikator mencerminkan pihak yang memulai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. (lihat, Zulkarimein Nasution, *Ibid*, hal 43.)

politik dapat berwujud sebagai individu (*individual source*) atau berupa kelompok, orang banyak (kolektif). Tetapi pada sisi lain, sebenarnya seorang komunikator individual dapat dipandang sebagai “*colective source*” (sumber kolektif) apabila yang bersangkutan mempunyai status atau kedudukan dalam kelompok tersebut.

Dalam menganalisis komunikator politik dalam masyarakat, terlebih dahulu perlu memahami karakteristik masing-masing komunikator. Oleh karena itu **Dan Nimmo (1978)** mengemukakan tiga kategori komunikator politik (tipologi komunikator politik) meliputi politisi yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator *profesional* dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (*part-time*).¹⁹

2) Khalayak Komunikasi Politik

Khalayak adalah pihak yang menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan atau sering disebut penerima, *receiver*, atau *audience*. Pada dasarnya khalayak hanyalah peran sementara, sebab dimungkinkan pada waktu dan posisi yang lain penerima pesan dapat berfungsi sebagai komunikator.

¹⁹ . Dan Nimmo, *Ibid*, hal. 30.

Ciri khalayak yang ideal dalam komunikasi politik adalah harus mempunyai perhatian untuk mengikuti perkembangan politik yang terjadi disekelilingnya.²⁰ Itu berarti khalayak harus mempunyai arus informasi yang teratur, baik melalui saluran antar pribadi maupun melalui media massa (*mass media*).

3) Saluran-saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan (*message*) kepada penerima (*receiver*).²¹ Saluran ini dapat dianggap sebagai penerus (penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi.

Saluran komunikasi politik dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu (pihak atau unsur) yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik termasuk ke dalam saluran komunikasi politik. Almond dan Powell (1966) seperti dikutip Zulkarimein Nasution membagi saluran-saluran komunikasi politik pada:

- a. Struktur wawanmuka (*face-to-face*) informal
- b. Struktur sosial tradisional
- c. Struktur masukan (*input*) politik
- d. Struktur keluaran (*output*) politik

²⁰ . Dalam proses komunikasi dikenal adanya proses seleksi pada diri khalayak dalam hal *attensi*, *interpretasi*, dan *retensi*. Jadi faktor adanya perhatian merupakan prasyarat untuk berlangsungnya komunikasi tersebut.

²¹ . Evert M. Rogers, dalam *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Edward Depari dan Calvin MacAndrews (ed.), (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, cet. VII, 1998), hal. 17.

e. Media massa.²²

4) Teknik Komunikasi Politik

a. Persuasi Politik

Persuasi adalah perubahan sikap mental dan perilaku orang melalui kata-kata terucap atau tertulis, menanamkan opini baru dan suatu usaha sadar untuk mengubah sikap mental, keyakinan atau perilaku orang melalui transmisi sejumlah pesan.²³ Persuasi biasanya mengandung unsur tujuan, yaitu suatu usaha komunikator untuk mencapai tujuan melalui pembicaraan. Maka pada sisi lain persuasi sering disebut komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan.

Persuasi dapat dilakukan dengan cara disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh salah satu partai politik menyampaikan program-program politiknya (disengaja) dan seorang secara spontan memuji program-program tersebut (tak disengaja). Maka, persuasi sebenarnya sebagai proses timbal-balik yang di dalamnya komunikator dengan sengaja atau tidak menimpulkan perasaan responsif pada orang lain.

²² . Zulkarimein Nasution, *Ibid*, hal. 57.

²³ . *Ibid*, hal 119.

Sifat dan proses persuasi antara lain biasanya persuasi menyangkut maksud atau suatu upaya dari pihak komunikator untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembicaraan dan persuasi bersifat dialektikal. Dengan kata lain persuasi merupakan proses resiprokal (timbang-balik) di mana, komunikator berusaha dengan sadar maupun tidak untuk membangkitkan suatu tali penghubung (*chord*) yang responsif di pihak lain.

b. Propaganda Politik

Menurut rumusan **Oxford Dictionary**, propaganda adalah suatu perhimpunan atau program untuk menyebarkan suatu doktrin atau cara.²⁴ Sedangkan **Ellul** mendefinisikan propaganda sebagai suatu alat yang dipergunakan oleh sekelompok yang terorganisir untuk menjangkau nilai-nilai individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam suatu organisasi.²⁵

Ada beberapa teknik propaganda yang sering dipergunakan dalam komunikasi politik antara lain, melalui penggunaan stereotif, penggantian nama, seleksi, sungguh-sungguh berbohong, pengulangan, *assertion*, dan *the appeal to authority*. Sedangkan

²⁴ . di kutip Zulkarimein Nasution, *Ibid*, hal. 106.

²⁵ . Pendapat Ellul tersebut di kutip Dan Nimmo, *Ibid*, hal 125.

Dorothy Mulgrave seperti dikutip A. H. Hasanuddin membagi 7 macam teknik propaganda yaitu:

1. *Name calling device* (memberi gelar buruk)
2. *Gelittering Generalaties device* (menyebut kata penghubung indah yang digemari orang)
3. *Transfer device* (mempertautkan suatu perkara yang degemari dengan sesuatu yang disukai orang banyak)
4. *Testimonial device* (memakai ucapan orang terkemuka)
5. *Plainfolks device* (bergerak sebagai rakyat banyak, atau menggunakan semboyan rakyat)
6. *Card Stacking device* (pemutarbalikan persoalan)
7. *Band wagon device* (mempergunakan alat-alat pemikat atau penarik).²⁶

c. Periklanan Politik

Periklanan politik adalah pengiklanan citra (imej), daya tarik yang diarahkan untuk membangun sebuah reputasi. Periklanan politik adalah sebagai periklanan massa yaitu sebagai komunikasi dari suatu pihak kepada orang banyak. Periklanan politik mempunyai orientasi:

1. Sasarannya bukan individu dalam suatu kelompok melainkan pribadi yang independen terlepas dari kelompok.
2. Tujuannya untuk menarik perhatian orang agar bertindak dan memilih sendiri.

²⁶. A.H. Hasanuddin, *Rhetorika Da'wah & Publisistik dalam Kepemimpinan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal 20.

d. Rhetorika

Rethorika²⁷ adalah komunikasi dua arah antara seseorang komunikator dengan orang lain dalam arti dua orang atau lebih. **Richard E. Young, Alton L. Becker dan K. L. Pike** dalam bukunya "*Rhetoric Discovery and Change*" seperti dikutip A. H. Hasanuddin mendefinisikan retorika sebagai ilmu mengajarkan kita menggarap masalah wicara, tutur kata secara heiristik-epistimologi , untuk membina saling pengertian dan kerjasama.²⁸

Rhetorika dapat terjadi antara seorang komunikator dengan komunikan. Masing-masing berusaha untuk saling mempengaruhi pandangan yang lain melalui tindakan-tindakan yang resiprokal dan timbal balik.

2. Tinjauan Umum Tentang Da'wah Politik

a. Pengertian Da'wah Politik

Secara etimologis da'wah berasal dari bahasa Arab yang berarti *seruan-ajakan-panggilan*.²⁹ Sedangkan secara terminologis da'wah

²⁷ . Rhetorika diartikan sebagai "*the art of persuasion*" yaitu ilmu kepandaian berbicara (berpidato), atau teknik seni berbicara di depan umum. (A. H. Hasanuddin, *ibid*, hal. 11).

²⁸ . A. H. Hasanuddin, *Ibid*, hal. 14.

²⁹ . Toto Tasmara, *Ibid*, hal. 31.

adalah penyampaian pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.

Drs. H. Endang S. Anshari, MA., mengartikan da'wah secara luas yaitu penjabaran, penterjemahan, dan pelaksanaan Islam dalam perikehidupan dan penghidupan manusia (termasuk di dalamnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan sebagainya).³⁰

Pengertian da'wah di atas menegaskan bahwa dimensi da'wah mencakup berbagai aspek termasuk wilayah politik. Maka da'wah politik adalah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam sebuah sistem politik dengan tujuan agar terealisasinya ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat.

b. Unsur-Unsur Da'wah Politik

1. Subjek Da'wah Politik

Subjek da'wah (Da'i) seperti dikutip Jalaluddin Rakhmat dari pendapatnya **Fathi Yakan**, ialah setiap orang Islam yang memberikan kepada orang lain apa yang diperlukannya dalam bentuk pemikiran dan pengarahan, serta menyakinkan secara persuasif dan

³⁰. E. S. Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam*, (Jakarta:PenerbitUsaha Interprises, 1976), hal, 87.

mendorongnya untuk bergerak dengan cara-cara yang efektif.³¹ Subjek da'wah tersebut dapat berwujud sebagai individu atau sebagai kelompok.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap muslim (yang *mu'allaf*) secara otomatis dapat berperan sebagai komunikator (*muballigh*) yang punya kewajiban menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan Secara khusus, yang dapat menjadi subjek da'wah adalah mereka yang mengambil keahlian khusus (*mutakhasis*) yaitu mereka yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang agama Islam (Q.S. at-Taubah:122).

Golongan *mutakhasis* seperti dimaksud dalam ayat di atas, adalah mereka para ulama (orang yang mempunyai pemahaman tentang agama) yang menyampaikan ilmunya tersebut dalam bentuk penerangan, pendidikan, serta peringatan-peringatan dengan tujuan agar orang tersebut dapat menerima dan melaksanakan pesan-pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pelaku atau pelaksana da'wah politik apabila melihat penjelasan di atas, tentunya adalah mereka para ulama, para pengambil *polecy* (keputusan) baik yang ada di dalam lingkungan kekuasaan negara

³¹. Jalaludin Rahmat, dalam *Hegemoni Budaya*, dengan Idi Subandy Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik (ed.), (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997), hal 51.

(pemerintahan), atau para profesional sebagai politikus muslim yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Sedangkan para politikus baik yang tersebar di berbagai partai politik atau yang berprofesi sebagai akademisi berfungsi untuk penyeimbang (*control*) sosial agar terjadi keseimbangan informasi dan pemahan pesan-pesan da'wah. Ini akan terjadinya sebuah informasi yang dinamis dalam masyarakat.

2. Objek Da'wah Politik

Yang dimaksud dengan objek da'wah atau sasaran da'wah politik adalah manusia, baik dirinya sendiri maupun orang lain.³² Pengertian manusia di sini adalah mencakup pribadi, kelompok sosial maupun ummat secara keseluruhan.

Secara general sasaran da'wah politik ditujukan kepada dua kelompok masyarakat: orang Islam dan bukan orang Islam. Sedangkan secara spesifik pengklasifikasian objek da'wah politik adalah pribadi sebagai seorang muslim (baik sebagai anggota partai politik ataupun sebagai partisan), kelompok sosial, atau negara secara institusi.

³². H. M. Hafi Anshori, *Pemahaman dan Pengamalan Tentang Da'wah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 103.

3. Materi Da'wah Politik

Materi atau pesan-pesan da'wah adalah ajaran Islam itu sendiri.³³ Pesan da'wah menurut Al-Qur'an (Al-A'raf, 157), harus mengandung (1) *amar ma'ruf nahi munkar* – perintah berbuat baik dan larangan berbuat jelek--; (2) penjelasan halal dan haram, dengan kata lain syri'at Islam dalam seluruh aspeknya; (3) hal-hal yang membebaskan manusia dari beban kehidupan dan belenggu yang memasung kebebasan mereka.³⁴

Sifat pesan da'wah dapat bersifat religius, sosial, ekonomis, kultural dan politis. Oleh karena itu, pesan da'wah politik yaitu semua pernyataan atau kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat yang memuat semangat ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) baik tertulis maupun lisan dengan pesan-pesan (risalah).

4. Metode Da'wah Politik

Metode Da'wah Politik adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain pendekatan da'wah harus bertumpu pada suatu pandangan "*human oriented*" menetapkan penghargaan atas diri manusia.

³³. R. Agus Toha Kuswata dan R. UU Koswara Surya Kusumah, *Komunikasi Islam dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta:Arikha Media Cipta, 1986), hal. 36.

³⁴. Jalaluddin Rakhmat, *Ibid*, hal 51.

Asmuni Syukir membagi metode da'wah pada 8 cara:

Metode ceramah (retorika da'wah), metode tanya jawab, debat (*mujadalah*), percakapan antar pribadi, metode demonstrasi, metode da'wah Rosulullah SAW., pendidikan agama, dan mengunjungi rumah (*silaturahmi*).³⁵

Dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada komunikan, maka seorang komunikator dapat menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode ceramah yaitu metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan, tentang sesuatu masalah dihadapan orang banyak.
- b) Demonstrasi atau "*direct method*" adalah metode penyampaian da'wah dengan jalan memberikan suri tauladan langsung (metode dalam bentuk aksi sosial).
- c) Pelatihan (pendidikan) yaitu metode da'wah dengan menggunakan media pelatihan.
- d) Diskusi yaitu metode dalam mempelajari atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikan sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan kepada penerima da'wah.
- e) *Press release* (keterangan pers) adalah metode da'wah dengan menggunakan media tulis dan audio visual yang memuat tentang

³⁵ . Asmuni Syukir, *Ibid*, hal. 163.

pernyataan sikap , tuntutan ataupun pandangan partai mengenai suatu permasalahan.

- f) Kampanye politik sebagai metode untuk menarik simpati masyarakat luas. Metode ini biasanya dilakukan ketika akan berlangsungnya pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU).

5. Media Da'wah Politik

Media da'wah adalah alat yang menjadi saluran yang menghubungkan idee dengan ummat.³⁶ Adapun media da'wah dapat dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

- a) Lembaga-lembaga pendidikan
- b) Lingkungan keluarga
- c) Organisasi-organisasi Islam
- d) Hari-hari besar Islam
- e) Media Tulisan
- f) Seni Budaya.³⁷

Sementara **Dr. Hamzah Ya'kub** membagi sarana da'wah (*washilah da'wah*) menjadi:

- 1) *Spoken words* yaitu jenis media da'wah yang berbentuk ucapan atau bunyi ditangkap dengan indera telinga
- 2) *Printed writting* yaitu media da'wah yang berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan indera mata

³⁶. Abdul Kadir Munsyi, *Metode Diskusi dalam Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, tth.) hal 41.

³⁷. *Ibid*, hal. 168.

- 3) *The audio visual* yaitu media yang berbentuk gambar hidup yang dapat dilihat.³⁸

Dengan demikian media da'wah politik dapat berupa media yang berbentuk lisan, tulisan dan media *audio visual*.

c. Dasar Hukum dan Tujuan Da'wah Politik

1. Dasar Hukum Da'wah Politik

Dalam menguraikan dasar hukum da'wah politik, penulis menggunakan pandangan umum yang dijadikan landasan filosofis oleh Partai Keadilan dalam melaksanakan da'wah politiknya. Prinsip-prinsip umum tentunya berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam.

Universalitas Islam telah menjadi inti pemahaman kaum Muslimin terhadap konsep-konsep Islam dalam seluruh dimensinya. Islam adalah "*sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan da'wah, tentara dan fikrah,*

³⁸. H. Amal Fathullah, dalam *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1998), hal. 154.

akidah yang lurus dan ibadah yang benar".³⁹ Keuniversalan tersebut sebagai suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara, dan masyarakat.

Dengan demikian, setiap muslim harus tunduk dan menyerahkan diri secara total kepada-Nya. Totalitas hidup manusia (seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Imran:112; Al-Baqarah: 208), konsekuensinya setiap muslim tidak boleh mencukupkan dirinya dengan mengamalkan sebagian saja dari ajaran Islam. Sosial, politik, ekonomi, budaya adalah bidang-bidang yang terkait erat dengan kehidupan seorang Muslim yang harus dimasukinya.

Partai politik dapat menjadi alternatif sarana bagi langkah-langkah perjuangan politik kaum Muslimin. Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari tugas da'wah yang diemban ummat Islam. Tentunya, setiap pekerjaan da'wah harus sesuai dengan prasyarat yang mendukungnya. Prasyarat tersebut seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa':77, dan Al-Muzammil:10.

Da'wah secara terang-terangan (*jahriyyatu al-da'wah*) merupakan asal aktivitas da'wah (Q.S. Nuh:8-9). Oleh karena itu eksistensi gerakan da'wah akan semakin mendapatkan tempat dalam masyarakat.

³⁹. Nur Mahmudi Ismail, *Ibid*, Loc. Cit. hal. 34.

Pada bagian lain, beramal jama'i merupakan *sunnah kauniyah*, tata alamiyah dan sekaligus tuntutan syar'i. Oleh karena itu pelaksanaan da'wah politik dengan menggunakan partai politik sebagai media perjuangannya adalah sesuai dengan perintah Allah Swt.

b. Tujuan Da'wah Politik

Dalam melakukan da'wah politik, tidak lepas dari tujuan da'wah secara umum yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah (Q.S. An-Nisa': 36); ikhlas dalam beragama (Q.S. Al-Hayinah: 5); menetapkan hukum Allah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan ummat manusia (Q.S. al-Maidah:44,45, dan 47).⁴⁰ Sisi lain dari tujuan da'wah politik adalah terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masyarakat. Perubahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan agama Islam, yaitu terjadinya rahmat di alam (*rahmatan lil alamin*).

3. Hubungan antara Komunikasi Politik dan Da'wah Politik

Terminologi komunikasi politik pertama kali berkembang di Dunia Barat (Amerika dan Eropa), tepatnya terjadi setelah Perang Dunia I. Maka tidak heran munculnya penelitian-penelitian komunikasi politik pada tahun

⁴⁰ . Abdul Kadir Munsyi, *Ibid*, hal. 20-22.

1965-1980-an berasal dari Dunia Barat dan kemudian diikuti dengan munculnya beberapa tokoh komunikasi politik seperti Dr. Laswell, Dan Nimmo (1981); Edelman (1964) dan yang lainnya. Tentunya paradigma yang berkembang tentang komunikasi politik sangat terikat dengan sistem politik dan sistem budaya yang mereka anut. Sedangkan da'wah politik adalah terminologi yang lahir dan berkembang di dunia Islam. Hal ini dikarenakan kata da'wah banyak tersurat dalam "teks" kitab suci Al-Qur'an. Untuk itu penyusun akan berusaha mensinkronkan dua terminologi bahasa di atas dengan tidak mengaburkan makna asalnya.

Hubungan antara komunikasi dan politik ialah bahwa politik adalah proses; seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan.⁴¹ Pembicaraan dalam arti inklusif, bertukar simbol, kata-kata, yang dituliskan atau diucapkan. Sedangkan komunikasi proses yang terikat dengan simbol, bahasa, kata-kata, sikap tubuh, dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi komunikasi juga terikat dengan bahasa komunikasi, sedang komunikasi juga mencakup wilayah politik seperti yang diungkapkan Roelofs.⁴²

Drs. H. Toto Tasmara dalam bukunya "*Komunikasi Dakwah*" menguraikan bahwa da'wah adalah bentuk lain dari komunikasi.⁴³ Da'wah

⁴¹ . Dan Nimmo, *Ibid*, hal. 8.

⁴² . *Ibid*, hal 9.

⁴³ . H. Toto Tasmara, *Ibid*, *Loc. Cit.*, hal. 39.

apabila ditinjau dari segi komunikasi adalah merupakan suatu proses menyampaikan pesan-pesan (*message*) berupa ajaran Islam yang disampaikan secara persuasive (hikmah) dengan harapan agar komunikan dapat bersikap dan berbuat amal shaleh sesuai dengan ajaran Islam tersebut.

Perbedaan antara komunikasi dan da'wah terletak pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan komunikasi yaitu terjadinya partisipasi atas ide dan pesan dari komunikator sehingga terjadi perubahan sikap dan tingkah laku. Sedangkan da'wah dilakukan secara *persuasive* agar terjadi perubahan tingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa proses da'wah juga merupakan proses komunikasi, tetapi tidak semua proses komunikasi merupakan proses da'wah.

Hubungan fungsional antara politik dengan da'wah sering tidak dimengerti dengan baik oleh sementara kaum muslimin sehingga banyak menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dengan da'wah. Hal ini dikarenakan banyaknya anggapan bahwa politik berkembang di Dunia Barat yang cenderung anarkis dan menimbulkan keretakan sosial sedangkan dalam dunia Islam yang ada adalah terminologis syasah yang bertujuan menegakkan syari'at Islam.

Kegiatan da'wah dalam Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, karena "*amar ma'ruf nahi munkar*" juga meliputi semua aspek kehidupan. Dengan demikian, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial,

dan yang lainnya dapat dijadikan kegiatan da'wah terutama *da'wah ilallah* (Q.S. Yusuf:108).

Bagi seorang Muslim, kegiatan politik haruslah menjadi kegiatan integral dalam kehidupan yang utuh, karena kegiatan politik adalah sebagai alat da'wah.⁴⁴ Sebagaimana da'wah mencakup berbagai aspek dan dimensi tanpa terbatas ruang dan waktu.

Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu medium terpenting untuk mencapai tujuan da'wah; jadi bukan sebaliknya da'wah dijadikan medium untuk tujuan politik, yaitu politik telah terlepas oleh kendali moral.⁴⁵ Dimata wahyu, kegiatan politik haruslah diorientasikan kepada tujuan-tujuan da'wah, berpandu pada tujuan-tujuan da'wah inilah yang dapat menolong politik agar terlepas dari bingkai cita-cita moral.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membuat dekripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini hanya sebatas mendeskripsikan dengan melakukan analisis atas komunikasi politik DPW Partai Keadilan Daerah

⁴⁴ . Maftukin, *Politik dan Dakwah (Studi Tentang Aktivitas GOLKAR dalam Dakwah Islamiyah)*, (Skripsi: 1996), hal. 29.

Istimewa Yogyakarta. Hasil dari analisis tersebut kemudian digambarkan dan dilaporkan secara rinci. Jadi penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah setiap aktivitas komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih spesifik penelitian ini meliputi unsur-unsur komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi politik yang dapat ditunjukkan dengan berbagai program-program partai.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah pengurus DPW Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Partai Keadilan, Pengurus DPD Partai keadilan di Wilayah Yogyakarta, serta dokumen tertulis yang dapat dijadikan informasi atau masukan dalam proses pengumpulan data.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁵ . Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), hal. 111.

a. Observasi

Observasi dilakukan sebagai suatu usaha untuk mengetahui secara jelas dan langsung dari dekat kegiatan komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode ini dipandang perlu untuk menghindari terjadi manipulasi informasi dan meyakinkan kebenaran data yang diperoleh melalui interview. Dengan melakukan observasi, maka data dapat diperoleh secara langsung sebagai cara dalam meneliti sebuah gejala tertentu.

Secara rinci observasi dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai proses komunikasi politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta, keadaan dan respon khalayak terhadap kegiatan partai Keadilan.

b. Metode Interview

Metode interview dilakukan untuk mengetahui gambaran umum program-program Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu bentuk komunikasi politik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, sebab dalam melaksanakan interview bebas bertanya dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Jenis interview bebas terpimpin ini mudah dilakukan, karena seorang interviewer bebas mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab dengan bebas dan terbuka. Dalam melakukan interview ini,

penulis mempergunakan alat bantu berupa *interview guide* yang berfungsi sebagai penentu arah jalannya interview.

c. Metode Dokumentasi

Status metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai pelengkap, yaitu untuk mendapatkan data yang tidak mungkin diperoleh melalui interview maupun observasi, karena data tersebut sifatnya tertulis. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi adalah gambaran umum Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit penelitian, data tentang hasil-hasil pelaksanaan program-program politik yang sifatnya tertulis.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep terpenting dalam sebuah penelitian yang akan menentukan validitas data yang diperoleh. Untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan dengan menggunakan berbagai kriteria. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kepercayaan (*credibility*) keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Dalam menentukan keabsahan sebuah data, ada 9 teknik yang dapat dipergunakan yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik **triagulasi**, yaitu teknik dengan memanfaatkan data lain sebagai pembanding. Data yang diperoleh melalui pengamatan dicocokkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Atau membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh dari isi dokumen yang berkaitan.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan menggunakan teknik tersebut di atas, maka langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data. Untuk menganalisis data dalam studi ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dianalisis dengan argumentasi logika yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat. Hal ini untuk melihat kesesuaian antara teori yang disajikan dengan hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PARTAI KEADILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Partai Keadilan DPW DIY

Partai Keadilan (selanjutnya disingkat PK) adalah suatu partai yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim di tengah iklim demokratis yang peluangnya dibuka oleh reformasi Indonesia. Partai Keadilan didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 H bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1998 M oleh sejumlah aktivis muslim yang berkiprah dalam aktivitas keagamaan.

Melacak sejarah kelahiran partai ini, harus dimulai dengan melihat secara cermat gerakan da'wah Islam yang dibangun secara sistematis dan mendetail oleh aktivis-aktivis muda Islam dengan mengambil Masjid Kampus sebagai basis operasionalnya di awal tahun 1980-an. Lahirnya Partai Keadilan adalah sebuah fenomena gerakan *revivalisme* Islam di Indonesia dengan mengambil jalur politik sebagai media bagi penerapan syari'at Islam.

Partai Keadilan berbasis dari gerakan lembaga da'wah kampus yang merebak di hampir setiap Perguruan Tinggi sekuler di bawah tekanan rezim militer yang sangat Islam phobia. Akar gerakan ini adalah semangat untuk memunculkan kembali kejayaan Islam yang merujuk pada sistem kekhalifahan yang mereka anggap sebagai sistem pemerintahan yang menjadi tradisi politik Islam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin.

Partai Keadilan didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis. Hasil survey menunjukkan bahwa para aktivis da'wah, terutama yang tersebar di masjid-masjid Kampus di Indonesia dilakukan beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang berkembang di Indonesia. Bahwa sebagian mereka menyatakan bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk meneguhkan aktivitas da'wah dalam bentuk kepartaian dalam konteks formalitas politik yang ada sekarang.

Munculnya Partai Keadilan adalah Jawaban lanjut gerakan da'wah atas realitas internal gerakan dan trend eksternal dalam permasalahan ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan militer. *Setting* yang melatar belakangi partai ini adalah tahapan orbit da'wah (*mihwar*) yang baru saja sedang dijalani, yakni orbit tatanan internal (*mihwar tahzhimi*) dan orbit sosial (*mihwar sya'bi*).

Di Yogyakarta, kelahiran Partai Keadilan juga tidak lepas dari fenomena seperti telah di uraikan di atas. Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan atas inisiatif sejumlah aktivis muslim yang dahulunya bergerak dalam da'wah kampus. Antara lain mereka yang dulunya pernah aktif dalam organisasi Jama'ah Salahuddin UGM, HMI, PMII, Muhammadiyah, serta organisasi keagamaan lainnya.⁴⁶ Mereka secara historis punya romantisme sejarah dalam

⁴⁶ . *Wawancara* dengan Agus Purnomo, SIP., di Sekretariat DPW Partai Keadilan DIY, Tanggal 3 April 2001.

pengembangan demokratisasi serta satu visi politik. Partai Keadilan DIY adalah DPW yang pertama kali didirikan diantara sejumlah DPW Partai Keadilan secara nasional.

Partai Keadilan DIY dideklarasikan pada hari Jum'at, tanggal 18 September 1998 dengan jumlah DPD sebanyak 5 daerah meliputi DPD Kodya, DPD Kulonprogo, DPD Sleman, DPD Bantul, dan DPD Gunung Kidul.⁴⁷ Diantara Para pendukung dan pendiri partai ini terdapat para pakar dan tokoh masyarakat, diantaranya: Drs. H. Achmad Adaby Darban, SU., Dr. HM. Kuswandi, SU., M.Phil., Apt., Prof. Drs. H. Dochak Latief, Dr. HM. Akhyar Adnan, MBA., Akt. Yang tergabung dalam (Majelis Hikmah Partai Keadilan DIY).⁴⁸

Secara umum ada tiga tahap yang telah dilalui oleh DPW PK DIY yaitu: *tahap pertama* adalah tahap eksistensi partai, yang memuat aktivitas partai sejak deklarasi pada hari Jum'at tanggal 18 September 1998 sampai menjelang Pemilu 1999; *tahap kedua* adalah tahap partisipasi politik pada pemilu 1999; dan *tahap ketiga* adalah tahap paska Pemilu 1999.⁴⁹

⁴⁷ . *Jurnal DPW PK Daerah Istimewa Yogyakarta*, Edisi 3/I, 25 Desember 1998 - 8 Januari 1999. hal. 3.

⁴⁸ . *Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPW Partai Keadilan DIY*, Masa Bakti September 1998-Maret 2001, hal. 13.

⁴⁹ . *Ibid*, hal. 12.

Tahap Eksistensi Partai

Tahap ini ditandai dengan proses pembentukan struktur organisasi wilayah, daerah, dan cabang-cabang partai, rekrutmen keanggotaan, pembentukan pengurus dari tingkat wilayah sampai tingkat cabang bahkan ranting, penataan sistem administrasi partai dan perintisan hubungan dengan pihak eksternal. Eksistensi partai dimulai dengan deklarasi DPW Partai Keadilan DIY di Stadion Kridosono Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 18 September 1998 dengan melantik pengurus DPW dan 5 ketua DPD dihadapan lebih dari 5000 kader dan simpatisan. Setelah deklarasi dilakukan konsolidasi dan pengokohan struktur partai. Pembentukan DPD, DPC, dan DPRa dan kelengkapan struktur lainnya segera dilakukan sebagai upaya ekspansi struktural dan teritorial. Sampai pemilu bulan juni 1999 telah terbentuk 5 DPD, 67 DPC, dan 113 DPRa sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

TABEL I
DATA DPD,DPC, dan DPRa PK DIY

No	DPD	Jml Kec.	Jml DPC	Jml Desa	Jml DPRa
1.	Sleman	17	17	86	32
2.	Kodya	14	14	45	31
3.	Bantul	17	16	75	38
4.	Kolonprogo	12	11	88	8
5.	Gunung Kidul	15	9	144	4
	Jumlah	75	67	438	133

Sumber: LPJ DPW PK

Penguatan ma'nawiyah dan fikriyah terhadap para kader dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan diskusi bersama para pakar yang berkompeten di bidangnya terutama peningkatan wawasan politik. Rekrutmen keanggotaan dilakukan dengan menyebarluaskan formulir keanggotaan ke seluruh daerah yang selanjutnya diadakan training orientasi partai. Sedangkan hubungan kelembagaan telah terjalin dengan partai-partai Islam lainnya.

Tahap Partisipasi Politik

Pada tahap ini dilaksanakan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mensosialisasikan partai di tengah masyarakat dengan tim sukses Pemilu sekaligus sebagai evaluasi tingkat penyambutan masyarakat terhadap visi, misi dan tujuan yang diusung Partai Keadilan. Ternyata pada tahap ini terjadi dinamika kepartaian yang meningkat pesat. Diawali dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) pada tanggal 12-13 Desember 1998 dengan tema "*Menuju Kesiapan Total Menghadapi Pemilu 1999*" secara internal berusaha melakukan internalisasi nilai-nilai dasar kepartaian kepada setiap pengurus dan anggota. Kemudian dilakukan konsolidasi dan mobilisasi semua elemen struktural, dan secara eksternal dilakukan sosialisasi Partai Keadilan kepada seluruh elemen masyarakat dan optimalisasi daya dukung masyarakat.

Berbekal semangat menunaikan kerja da'wah, pembentukan Tim Sukses Pemilu dilakukan. Tim ini memfokuskan kerja pada upaya pencapaian target

pada pemilu 1999. Tiga Sub tim dibuat di dalamnya, yaitu Tim Opini, Tim Aksi, dan Tim Kaderisasi.

Hasil Pemilu 1999 adalah 4 orang anggota DPRD II dan 1 orang DPRD I dengan distribusi perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 2
DATA HASIL PEMILU 1999 PK DIY

No	Kab.	Tingkat	Perolehan	Prosentase	Legislator
1.	Sleman	DPR RI	10.409	2,01%	
		DPRD I	11.384	2,20%	
		DPRD II	11.38	2,22%	1
2.	Kodya	DPR RI	4.467	1,89%	
		DPRD I	4.960	2,14%	
		DPRD II	4.946	2,18%	1
3.	Bantul	DPR RI	6.290	1,43%	
		DPRD I	6.716	1,54%	
		DPRD II	6.242	1,52%	1
4.	Kulonprogo	DPR RI	3.818	1,6%	
		DPRD I	4.114	1,81%	
		DPRD II	4.007	1,79%	1
5.	Gunungkidul	DPR RI	2.624	0,73%	
		DPRD I	2.705	0,76%	
		DPRD II	2.639	0,72%	
6.	DI Yogyakarta	DPR RI	27.808	1,54%	
		DPRD I	29.879	1,66%	1
		DPRD II	29.192	1,50%	

Sumber: LPJ DPW PK DIY

Tahap Konsolidasi Paska Pemilu 1999

Dalam tahap ini dilakukan konsolidasi baik personal, struktural maupun sosial politik untuk menata dinamika Partai selanjutnya. Ini dilakukan setelah berakhirnya Pemilu 1999 sebagai langkah untuk membangun kembali motivasi

dan penyegaran kerja partai, maka Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan DIY menyelenggarakan Musyawarah Kerja yang diperluas pada tanggal 17 Agustus 1999 sekaligus untuk menindaklanjuti beberapa keputusan Mukernas tanggal 1 Agustus 1999. Hasil yang disepakati adalah perlunya dilakukan konsolidasi personal, struktural dan sosial politik.

B. Struktur Organisasi Partai Keadilan DPW DIY

Struktur organisasi PK wilayah Yogyakarta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PK, seperti tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu: *Musyawarah Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Syri'ah Wilayah*.⁵⁰ Kesemua unsur-unsur di atas adalah merupakan kesatuan manajemen yang utuh.

Besarnya lembaga dan badan tersebut di atas, untuk masing-masing unit organisasi daerah disesuaikan dengan besarnya kegiatan manajerial di dalamnya. Begitu juga mengenai tugas dan tanggungjawab di daerah sejalan dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan lembaga dan badan yang membawahnya di tingkat wilayah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga dan badan tersebut di atas, akan diuraikan di bawah ini:

⁵⁰ . *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dalam Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta: Sekretarian Partai Keadilan, 1998), hal. 77.

1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)

Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah lembaga kekuatan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan 1 kali dalam 4 tahun dengan peserta sebagai berikut:

1. utusan daerah dan cabang yang terpilih secara langsung dalam keanggotaan musyawarah wilayah,
2. para anggota Majelis Pertimbangan Wilayah,
3. para anggota Dewan Pimpinan Wilayah,
4. utusan Dewan Pimpinan Pusat.

Musyawarah Wilayah yang merupakan forum musyawarah tertinggi di wilayah berfungsi sebagai berikut:

- a) meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah,
- b) memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah,
- c) memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Wilayah dengan jalan memilih ketua dan dua orang wakilnya yang sekaligus berfungsi sebagai formateur pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah,
- d) menetapkan Program kerja DPW,
- e) mengevaluasi pelaksanaan keputusan-keputusan dan pengesahan laporan kerja pimpinan,
- f) menetapkan penyelenggara Musyawarah Wilayah berikutnya.

2. Majelis Pertimbangan Wilayah

1. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri dari sebanyak-
 ○
 banyaknya 9 orang anggota yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah.
2. Syarat keanggotaan Majelis Pertimbangan Wilayah adalah yang telah menjadi Anggota ahli partai untuk Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota dewasa untuk anggota lainnya, melaksanakan asas dan tujuan partai, berkelakuan baik dan komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota, juga mengetahui hukum-hukum syari'at, bersifat amanah dan berwibawa memiliki pengalaman organisasi dan politik.
3. Jika ada anggota Majelis Pertimbangan Wilayah berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat penggantinya sedangkan pengesahannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Majelis Syuro.

Tugas Majelis Pertimbangan Wilayah

- a) Majelis Pertimbangan Wilayah adalah pihak yang bertanggungjawab menggodok keputusan-keputusan dan rekomendasi MUSWIL, mengevaluasi jalannya kepengurusan wilayah dan memilih dua orang wakil dan sekretaris majelis.
- b) Apabila terjadi kevakuman pada jabatan Ketua dan Wakil Ketua dalam waktu yang sama, dan sulit diselenggarakan Musyawarah Wiayah, maka Majelis Pertimbangan Wilayah melakukan pemilihan pengganti dengan agenda menyampaikan hal tersebut pada Musyawarah Wilayah dalam penyelenggaraan Musyawarah berikutnya.

- c) Mensyahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah. Memilih ketua dan anggota Dewan Syari'ah Wilayah.
- d) Mendiskusikan dan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Wilayah.
- e) Mendiskusikan dan menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dan laporan-laporan keuangan.
- f) Meletakkan dan menetapkan rencana program kerja, mendiskusikan dan menetapkan anggaran yang diajukan bendahara sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- g) Menetapkan langkah-langkah kerja tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- h) Majelis pertimbangan wilayah menyelenggarakan Musyawarah rutin setiap empat bulan sekali, dan berhak menyelenggarakan Musyawarah Istimewa atas undangan ketua dan permintaan sepertiga anggota.
- i) Dalam musyawarah biasa atau Istimewa, Majelis Pertimbangan Wilayah dihadiri oleh mayoritas mutlak anggotanya.
- j) Apabila jumlahnya tidak mencapai, dapat diselenggarakan setelah tiga hari berikutnya dengan jumlah tidak kurang dari sepertiga, apabila sepertiga juga tidak tercapai, diselenggarakan tiga puluh hari sesudah itu dengan berapapun jumlah yang hadir.

- k) Undangan kepada para anggota Majelis Pertimbangan Wilayah yang disertai jadwal rencana kerja harus sampai kepada mereka lima belas hari sebelum penyelenggaraan untuk musyawarah biasa, dan sedikitnya lima hari untuk musyawarah istimewa.
- l) Apabila masa kerja Majelis Pertimbangan wilayah telah habis, maka terjadi situasi yang tidak memungkinkan terselenggaranya Musyawarah Wilayah untuk pemilihan Majelis Pertimbangan Wilayah yang baru, maka Majelis Pertimbangan Wilayah tersebut masih tetap dianggap berlaku dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga berakhirnya situasi tersebut sampai terselenggaranya pemilihan Majelis Pertimbangan Wilayah yang baru.
- m) Selain hal-hal yang disyaratkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka keputusan-keputusan Majelis Pertimbangan Wilayah dikeluarkan dengan mayoritas yang hadir.

3. Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan pimpinan wilayah tersusun dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Deputi-deputi yang mengikuti pembagian departemen pada tingkat pusat jika memungkinkan. Ruang lingkup kerja deputi-deputi pada Dewan Pimpinan Wilayah mengikuti ketentuan yang terdapat pada anggaran rumah tangga dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pimpinan pusat.

Dewan pimpinan wilayah adalah lembaga eksekutif di tingkat propinsi dan bertugas serta bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Menyiapkan program tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya kemudian mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Memimpin lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, mengarahkan, mengatur, menggiatkan aktivitas dan mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Menentukan anggaran dan kebijakan keuangan dan investasi yang diarahkan kepada pengembangan sumber-sumber keuangan partai, memimpin pelaksanaan setelah ditetapkan di Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menyiapkan rencana anggaran umum tahunan dan mengawasi pelaksanaannya sebagaimana diperkenankan oleh Musyawarah wilayah, meratifikasi prioritas setelah disetujui oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
6. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Wilayah sebagai persiapan untuk diajukan kepada Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
7. Menyusun sidang-sidang Musyawarah wilayah dan majelis pertimbangan wilayah sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
8. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Kepengurusan DPW Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama dapat dilihat dari SK DPP No. 70/SKEP/DPP-PK/I/2000 dengan susunan kepengurusan sebagaimana di bawah ini:

**MAJELIS PERTIMBANGAN
WILAYAH**

Fadlan Adham Hasyim, LC (KA)
Bodhi Dewantoro, SH.
Zaid Suprih Hidayat, S.Sos.
M. Wajdi Rahman, SIP.
Drg. Saptorini

DEWAN SYARI'AH

Drs. KH. Ghazali Mukri (KA)
Muhaimin, S.H., CN
Drs. KH. Mustafa Ismail, MA., LLM.
KH. Sulhan Zainuri, S.Ag.
KH. Nashir Harist, LC.
Masbiha

**KETUA UMUM
KETUA I BIDANG SDM &
KEWILAYAHAN**

Ida Nur Laila, S.Si, Apt.
Ulfi S. Mahmud, S.Ag.
H. Cholid Mahmud, ST.
Cahyadi Takariawan, S.Si., Apt.

- SDM & Kewilayahan

Akbar K. Setiawan, S.Pd.
KH. Tulus Mustafa, MA.
Agus Mas'udi
Sihnarman

- BKKBS

Ir. Arief Budiono
Setiaji Heri Saputra, S.Hut.

**KETUA II BIDANG KAJIAN
STRATEGIS**

**KETUA III
SEKRETARIS**

Siti Urbayatun, S.Psi.
Nur Aini, ST.; Adila, SE.
Dr. Rima Fitriyani
Wahyu Tusi Wardani, S.Si., Apt.
Sri Sumardiyati, A.Md.
Endang TS, SP.

- PPSDM

- Kajian & Pengembangan

Dwi Churnia, SIP.
Umi Munawariroh, S.Sos.
M. Darul Falah, S.Hut.
Slamet Widada, S.Pd.
Beni Kurnia, ST.

SEKRETARIS UMUM

- Sekretaris Administrasi
- Sekretaris Risbang

Abdul Azis, ST.
Ahmad Fuadi, SE., Akt.

BENDAHARA

HUMAS**DEPUTI KADERISASI**

- Biro Da'wah
- Biro Pemberdayaan SDM

DEPUTI POLKAM

- Biro Jurnalistik
- Biro Polhum

**DEPUTI KEPELOPORAN
PEMUDA**

- Biro Kampus
- Biro Sekolah
- Biro PLS (GK)

DEPUTI EKUIN

- Biro Pemberdayaan
- Biro Inkubasi
- Biro Kajian

DEPUTI KESRA

- Biro Pendidikan
- Biro Iptek & LH.
- Biro Kesehatan
- Biro Seni & Budaya

DEPUTI KEPANDUAN

Joko Priyanto

M. Ikhwanul Muslimin, SH., CN.

Muslihudin, ST.

Dr. Bambang Edi

Sulastri

Setiya Budi Indartono, ST.

Naning Maryanti

Agus Purnomo, SIP.

Fairuz Abdussalam, SS.

Asri Widiarti, S.Si.

Fajar Iqbal, SIP.

Supratiwi, S.Sos.

Era Purike

Cahyo Widodo

Ruri Febriyanto, SE.

Maria Noor

Setiya

Sri Suparmi, S.Pd.; Vera

Sofyan SD.

Ahmad Sumiyanto, SE.

Sutrisno, SP.

Rahayu

Kurniasih, SE.

Ir. Ganis Wirawan, MM.

Zulmahermy

Maskuri

Rizal Yaya, SE.; Agus Dwi Prayitno

Asar Jenjang; Hikmah; Ekantini Puji

Basuki

Drs. Eri Masruri

Drs. Agus Sofwan

Muzna Nurhayati, Amd.; Ely Damaiwati,
SS.

Dr. Ir. Widi Setyawan, M.Sc.

Devi

Masrin, S.Ked.

Dr. Santi Candra Dewi; dr. Tanjung

Drs. Syatori AR.

Wiwik Mardiyanti

Agung Triantoro, S.Si.

Nazula

C. Visi dan Misi Partai Keadilan DPW DIY

Masyarakat madani adalah sebuah model yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan bagi masyarakat Indonesia masa depan sebagai prasyarat pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Partai Keadilan akan ikut berkontribusi dalam peraihan cita-cita tersebut bersama partai-partai maupun unsur-unsur masyarakat lain yang memiliki kesamaan cita-cita.

Dalam posisi ini Partai Keadilan memiliki visi kepartaian yang mencerminkan keinginan untuk eksis dengan: (1) Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan ummat dan bangsa; (2) Menjadi wadah pendidikan politik bagi ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional; (3) Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia; (4) Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia; (5) Menjadi akselerator bagi wujudnya masyarakat madani di Indonesia.

Sedangkan misi yang dicanangkan guna pencapaian visi tersebut adalah (1) Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia; (2) Menegakkan eksistensi politik ummat Islam di Indonesia; (3) Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; (4) Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; (5) Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban dunia.

D. Platform Partai Keadilan DPW DIY.

1. Program Kerja Kesekretariatan

- a) Inventarisasi data pasca pemilu 1999 (berupa struktur DPD s. d. DPC susunan pengurus, program kerja DPD perolehan suara, komposisi DPRD, Jumlah kader) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi terakhir Partai. Target dari program ini adalah terdeteksinya struktur DPD s/d DPC, Susunan Pengurus, Program Kerja DPD, Perolehan Suara, Komposisi DPRD, dan jumlah & kualifikasi kader terdaftar.
- b) Pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan meliputi: pengelolaan surat masuk dan keluar; Pendelegasian tugas-tugas eksternal dan internal; pengaturan, penyediaan, inventarisasi dan merapikan sarana dan prasarana kantor, termasuk pinjam-meminjam barang.
- c) Dokumentasi meliputi: kliping berita-berita media massa yang dianggap perlu; meliput acara-acara kepartaian/peristiwa penting dalam bentuk kaset, tulisan dan sebagainya; konsep atau tulisan ilmiah/ buku dan sebagainya yang dianggap penting dan perlu.
- d) Optimalisasi jalur informasi dan komunikasi (internet dan telephone).

2. Program Kerja PPSDM Wanita

- a) Menyusun konsep metode pembinaan wanita.

Yang melatar belakangi penetapan program ini adalah kurangnya pembinaan wanita yang berorientasi kepada kepekaan

kerumahtanggaan. Dengan tujuan untuk memerjelas spesifikasi pembinaan wanita.

- b) Pelatihan manajerial pembina wanita.
- c) Forum kader S2 & S3.
- d) Sosialisasi materi-materi kewanitaan.

3. Program Kerja Pengkajian dan Pengembangan Wanita

- a) Pembuatan data base kader wanita,
- b) membuat forum komunikasi antar wajahh wanita dan elemen lain yang terkait,
- c) pendataan personal dan lembaga kewanitaan yang berpengaruh serta langkah-langkah pendekatan personal,
- d) penyiapan struktur wanita keadilan,
- e) kajian tentang masalah kewanitaan di DIY,
- f) pembuatan perpustakaan wanita,
- g) penerbitan bulletin tentang pemberdayaan wanita,
- h) pendataan (quesioner) kebutuhan & kemampuan manajerial wanita,
- i) sinergisasi kerja dan informasi dengan staff wanita di Deputi.

4. Program Kerja Deputi Kepanduan

- a) Pelatihan dasar jasadiyah dengan jenis kegiatan mukhayyam berjenjang; pembuatan studio alam (silaturrahmi tokoh/ penduduki kerja bakti lingkungan),

- b) bakti kepanduan (pelayanan kesehatan, penghijauan, dan perlombaan-perlombaan).

Struktur Deputy Kepanduan Partai Keadilan DPW DIY meliputi kepala deputy, korsad, Sar-Pala, dan Litbang. Korsad merupakan kesatuan tugas yang berfungsi untuk pengamanan yang meliputi: personal, komunikasi dan intelejen, aset partai dan infrastruktur. SAR & Pencinta alam merupakan kesatuan yang berfungsi untuk bantuan kemanusiaan, bencana alam, dan pengabdian sosial masyarakat. Sedangkan Litbang merupakan biro yang bertugas sebagai pengembangan atau penelitian format kepanduan.

5. Program Kerja Biro Sekolah

- a) Pembentukan dan pemantapan struktur internal Da'wah sekolah (DS) yaitu dengan (1) membentuk biro sekolah di tingkat (biro sekolah DPD) dilanjutkan dengan pembentukan perangkat struktur di bawahnya, sampai pembentukan tim-tim sekolah di tiap-tiap sekolah. Lembaga ini akan mengkoordinasikan da'wah sekolah (DS) di tingkat Kabupaten ke bawah sampai ke tingkat sekolah-sekolah; (2) pembuatan tata aturan biro sekolah DPW, biro sekolah DPD dan perangkat struktur di bawahnya. Beirisi hubungan antar lembaga, hak dan kewajiban masing-masing lembaga, keanggotaan dan seterusnya; (3) Perumusan kesepakatan-kesepakatan misalnya pertemuan antar koordinator biro secara rutin

pembuatan piranti pendukung, termasuk pula pembuatan format laporan dan hal-hal yang diperlukan.

- b) Penyusunan dan Perumusan Manhaj Da'wah Sekolah. Yaitu dengan (1) membentuk tim perumus manhaj da'wah sekolah dan (2) merumuskan dan menyempurnakan manhaj da'wah sekolah.
- c) Koordinasi biro sekolah daerah, dengan spesifikasi kegiatan meliputi: (1) mengadakan koordinasi rutin dengan ketua biro sekolah DPD dengan agenda pembahasan laporan perkembangan masing-masing DPD; (2) mengadakan bimbingan dan pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk biro sekolah daerah; (3) mengadakan bimbingan dan pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk biro sekolah daerah; (4) mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh ADS di D.I. Yogyakarta sebagai langkah awal penumbuhan jaringan antar sekolah.
- d) Pemunculan lembaga DS PK, dengan bentuk bentuk prgram (1) penumbuhan infrastruktur DS DIY berupa jaringan antar sekolah melalui kegiatan bersama, baik oleh siswa maupun alumni; (2) launching lembaga DS yang dimotori oleh aktivis PK, sebagai wadah aktivitas DS DIY.

Struktur DS PW PK DIY: deputi kepeloporan pemuda, biro sekolah, biro kampus, biro pemuda lingkungan. Biro sekolah membawahi biro sekolah DPD, waljihah DS tingkat daerah, jaringan DS tingkat daerah (tim sekolah).

6. Program Kerja Deputy IPTEK dan Lingkungan Hidup

Program kerja Deputy IPTEK & Lingkungan hidup meliputi sasaran internal dan eksternal. Sasaran internal dengan paket kegiatan:

- a) mewujudkan kelompok diskusi IPTEK & Lingkungan Hidup dengan tujuan proses akumulasi wawasan dan penempatan kemampuan untuk merumuskan konsep/pemikiran capacity building penguasaan teknologi, penerapan nilai Islam serta arah pendidikan dan industrialisasi dalam rangka realisasi pembangunan posisi tawar:
 - 1) Terhadap Parpol Islam sebagai langkah proaktif mengajukan gagasan-gagasan visioner tentang agenda ummat dan bangsa. Pemberian informasi tentang perkembangan partai dan agenda-agenda strategisnya.
 - 2) Terhadap Unsur Pro-Demokrasi sebagai langkah untuk melakukan kerjasama dalam program-program advokasi dan pelayanan yang menyangkut kepentingan rakyat.
 - 3) Terhadap Pemerintah dan ABRI untuk memperkuat dan menyeimbangkan aksi-aksi tekanan politik, audiensi dan pemberian masukan kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Mengajukan pandangan konseptual yang visioner dan cerdas mengenai persoalan bangsa.

- 4) Terhadap Media Massa: secara kontinue mengirimkan rilis pers tentang sikap dan pandangan partai mengenai isu-isu aktual yang berkembang.
 - 5) Terhadap Luar negeri: melakukan dialog dengan pejabat-pejabat lembaga internasional dan kantor kedutaan tentang isu-isu demokratisasi dan pembangunan nasional.
 - 6) Terhadap Masyarakat: merespon berbagai isu dan kasus yang menyangkut kepentingan rakyat banyak secara cepat dalam bentuk opini publik. Menunjukkan komitmen kepedulian dengan aksi-aksi advokasi dan pelayanan nyata, khususnya dalam masalah sosial ekonomi.
- b) Paket kegiatan meliputi (1) Pelatihan kemampuan kader dalam menyusun proposal penelitian dan pengembangan (litbang), penulisan karya ilmiah dan presentasi hasil penelitian; (2) inventarisasi karya ilmiah kader dan mewujudkan perpustakaan; (3) penggalangan instrumen pendukung berupa pusat-pusat penelitian pemerintah untuk pelatihan kegiatan litbang dan perekayasaan dalam bentuk praktek kerja lapangan (PKL) serta skripsi; (4) menyediakan pelayanan informasi beasiswa untuk studi lanjut; (5) pengembangan data-base teknologi, industri & bisnis serta SDM kader terkait di setiap DPD serta integrasi di tingkat DPW; dan (6) mewujudkan profit centre yang bergerak di bidang rancang bangun instrumentasi dan kendali proses, perangkat industri

proses termasuk pengolahan limbah serta jasa perbaikan dan perawatan perangkat industri dan laboratorium.

Sasaran Eksternal yang menjadi prioritas program Kerja Deputi IPTEK dan Lingkungan Hidup meliputi:

- 1) Diskusi panel dalam lingkup konsep/pemikiran *capacity building* penguasaan teknologi, penerapan nilai Islam, arah pendidikan dan industrialisasi.
- 2) Seminar ilmiah & workshop serta penerbitan proceedings.
- 3) Penerbitan majalah IPTEK dan lingkungan hidup semi ilmiah yang mengekspresikan konsep tawajun.
- 4) Integrasi hasil litbang IPTEK dalam agro-industri skala kecil (misal pakan molase, kacang hijau varietas unggul tengger, padi unggul varietas Atomita-4 yang diberi produksi tinggi, umur pendek, rasa nasi pulen, padi unggul varietas cilosari yang tahan serangan hama wereng coklat).

7. Program Deputi Politik dan Hukum PK DPW DIY

- a) Dengan tujuan sebagai upaya penyadaran Politik seluruh level, dengan bentuk program: pelatihan dasar-dasar politik Islam; pelatihan dasar-dasar ilmu politik; daurah pemikiran politiik Islam; Daurah pemikiran politik barat; kajian tokoh; Pelatihan dasar-dasar tata negara; pelatihan perbandinagn sistem politik; pelatihan perbandingan sistem pemilu; diskusi aktual, seminar aktual. Target yang ingin dicapai dari beberapa program di atas adalah massifikasi kesadaran politik internal dan

eksternal, peningkatan kualitas personal anggota, serta meningkatnya kritisisme personal anggota.

- b) Kemampuan analisa Politik Anggota dengan bentuk program: pelatihan analisa politik Islami; Pelatihan analisis politik kontemporer; dan pelatihan proyeksi politik. Adapun target yang diperoleh meliputi penguasaan analisa qur'ani, analisa klasik, analisa kontemporer, dan peningkatan proyeksi politik lokal dan nasional.
- c) Kecakapan Lapangan dengan bentuk program kerja: Kliping & analisa politik 2 pekanan; pelatihan teknik dan prosedur pembelaan hukum; propaganda politik; pemetaan politik; workshop retorika; seminar/kampanye external; pelatihan debat politik; analisa politik 2 pekanan; dan penyuluhan hukum. Target yang akan diperoleh meliputi penguasaan pemetaan informasi media, penguasaan prosedur dan teknik pembelaan hukum, penguasaan penyusupan politik, peningkatan manajemen aksi, penguasaan teknik propaganda lapangan, dan penguasaan MKP.

8. Program Bidang POLKAM

- a) Biro Politik dan Hukum dengan bentuk program: Kajian politik rutin DPC dan DPD; Kajian Rutin DPW; Usbu' Tsqafi; Lomba Resensi Buku; Sosialisasi Kliping pilihan; dan Partisipasi dalam diskusi dan seminar.
- b) Biro Media Komunikasi dengan program kerja:

9. Program Kerja DEPUTI EKUIN

Deputi EKUIN mempunyai visi membangun kemandirian ekonomi Partai. Sedangkan misi yang ditetapkan yaitu mengusung ekonomi syari'ah sebagai sistem alternatif. Program kerja ekonomi keadilan terdiri dari:

- a) INKUBASI (penumbuhan wirausaha kader/ummat),
- b) kajian ekonomi Islam,
- c) pemberdayaan ekonomi rakyat.

10. Program Biro Pemberdayaan dan Inkubasi Ekonomi

- a) Forum komunikasi usaha, dengan tujuan untuk menumbuhkan profesionalisme dalam usaha, membantu memecahkan masalah dalam perekonomian anggota, wahana pengembangan kemandirian ekonomi ummat. Sasaran kegiatan ini adalah Pengurus, Kader dan Peminat ekonomi.
- b) *Muhibah iqtisodiyah*. Tujuan dari kegiatan ini membangun reasi dalam mengembangkan kekuatan ekonomi dan upaya untuk memberdayakan potensi ummat.
- c) *Local institutional building* (pembangunan lembaga/waljihah); riset komoditas.
- d) Pelatihan kewirausahaan.
- e) Pelatihan tematik (agribisnis, kerajinan, dan BMT).

11. Biro Kajian Deputy Ekuin DPW DIY

- a) Seri Kajian Ekonomi: Siasat Ekonomi (ekonomi, politik kontemporer); kewirausahaan/praktek ekonomi Islam.
- b) Riset & DISSEMINASI: Akses informasi/program/proyek ekonomi; data potensi ekonomi; dan penyebaran ke-intern PK.
- c) Perintisan “pengembangan Model Jaringan Usaha”: *Business Mapp* “*Waji'ah*”; penguatan usaha (intern dan ekstern).

12. Program Departemen Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan yang menjadi agenda partai, secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Mengupayakan agar kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan senantiasa harus ditujukan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, pemerataan, efesiensi, dan kesinambungan.
- b) Mengupayakan kebijakan desentralisasi administrasi dan manajemen. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan yang proaktif terhadap permasalahan kesehatan, memiliki otoritas, serta mengutamakan konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya.
- c) Perubahan paradigma orientasi pelayanan kesehatan dari kuratif kearah promotif dan preventif.

- d) Program peningkatan dan pelayan kesehatan tidak lagi berorientasi pada pemerintah dan provider saja, tetapi harus berorientasi pada hak dan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat, serta kemandirian upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
- e) Pembinaan sumber daya manusia.
- f) Mengupayakan agar perluasan dan peningkatan kualitas industri kesehatan yang diorientasikan ke hulu untuk menciptakan bahan baku dan alat kesehatan, dengan mengutamakan pada kemandirian, pengawasan, efisiensi, sesuai dengan keperluan dalam bidang pembangunan kesehatan.

BAB III
KOMUNIKASI DA'WAH POLITIK PARTAI KEADILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Komunikasi da'wah politik (*da'wah siyasi*) Partai Keadilan pada hakikatnya merupakan usaha untuk memecahkan atau menyelesaikan persoalan ummat dan masyarakat di berbagai bidang baik sosial-budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Partai pada dataran ini diharapkan akan menjadi solusi pemecahan berbagai masalah yang terjadi.

Aktualisasi *da'wah muassasi* yang dilakukan oleh organisasi politik Partai Keadilan telah membawa angin perubahan paradigma metodologis bagi pelaksanaan da'wah. Perubahan tersebut dikarenakan da'wah telah masuk pada wilayah politik yang terkait erat dengan kekuasaan.

Persoalan mengenai bagaimana komunikasi da'wah politik Partai Keadilan Daerah istimewa Yogyakarta yang akan penulis uraikan dengan mengacu pada data penelitian. Masalah-masalah yang akan dibahas antara lain unsur-unsur komunikasi da'wah politik Partai Keadilan yang terdiri dari: analisis pengurus sebagai sumber (komunikator) komunikasi, analisis materi-materi da'wah politik, analisis media atau sarana da'wah politik, dan analisis khalayak da'wah politik Partai Keadilan. Uraian selanjutnya juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik yang dipergunakan Partai Keadilan.

a. Unsur-unsur Komunikasi Da'wah Politik Partai Keadilan DIY

1. Pengurus Partai sebagai Sumber (Komunikator) Politik

Partai Keadilan mempunyai karakteristik idiologis yang dijadikan pegangan dalam menentukan arah perjuangan partai. Sebagai *manhaj da'wah* dalam karakteristik ini telah menjadi pembeda antara Partai Keadilan dengan partai yang lainnya. Diantara karakteristik yang dimiliki Partai Keadilan antara lain moralis, profesional, patriotik, moderat, demokrat, reformis, dan independen.⁵¹

Berkaitan dengan karakteristik tersebut di atas, apabila dilihat secara objektif dan realistis, maka ciri yang menonjol dan telah melekat pada fungsionaris Partai Keadilan DPW DIY antara lain: *Pertama*, komitmen moral yang menjadi landasan individu-individu pengurus dalam melaksanakan segala aktivitas partai. Cerminan nilai-nilai ke-Islaman memancar dari masyarakat Partai Keadilan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Partai Keadilan adalah masyarakat Islam yang kuat dalam memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam. Sehingga seorang non Muslim tidak diperbolehkan duduk dalam kepengurusan partai. Walaupun untuk menjadi seorang anggota, Partai Keadilan terbuka untuk semua golongan.

Pengurus partai mempunyai prinsip yang kuat terhadap implementasi akhlaq Islam (*akhlaqul karimah*). Hal tersebut disebabkan karena akar historis

⁵¹ . Lihat Sekilas Partai Keadilan, *Ibid.*, hal. 27.

mereka yang terbiasa dengan da'wah Islamiyah termasuk *da'wah bil hal*. Moralitas inilah yang menjadi teladan dan panutan ummat dan anggota kelompoknya.

Sebagai elit dan tokoh strategis, pengurus partai dalam berbagai hal telah menunjukkan komitmen moralitasnya yang tinggi. Antara lain adanya keputusan partai yang mengharuskan pengurus harus menjadikan dirinya sebagai pelayan ummat, adanya prasyarat *ikhlas* dalam melaksanakan tugas-tugas partai. Maka tidak heran, pengurus Partai Keadilan secara materil mereka tidak menerima insentif atau gaji dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk kader partai yang duduk di legislatifpun, mereka tidak diperbolehkan menerima gaji langsung dari pemerintah tetapi partai sendiri yang akan menentukannya.

Kedua, mayoritas kepengurusan Partai Keadilan DIY adalah mereka yang dahulunya terhimpun dalam berbagai organisasi da'wah, terutama da'wah kampus. Oleh karena itu mereka tidak asing lagi dengan yang namanya gerakan da'wah. Maka apabila ditinjau dari sisi da'wah, ini menunjukkan mereka adalah para profesional dalam bidang da'wah. Tetapi lain halnya, apabila ditinjau dari sisi politik, karena kebanyakan mereka baru terjun dalam dunia politik, mereka harus menyesuaikan dengan "dunia" baru yang dihadapinya.

Profesionalisme pengurus juga dapat ukur dari latar belakang (*background*) akademik mereka yang mayoritas adalah sarjana dari berbagai

bidang. Potensi inilah yang menjadi harapan partai dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan bertanggungjawab atas berbagai masalah yang dihadapi, baik masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Maka ini tepat sekali dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Q.S. Al-Isra ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ بِمَنْ هُوَ
اهْدَى سَبِيلًا.

"Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".⁵²

Ciri yang ketiga adalah semangat juang yang tumbuh pada kader partai dalam memperjuangkan da'wah Islam sebagaimana sama halnya dengan berjuang di jalan Allah. Karena menurut mereka tugas da'wah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani seorang muslim demi tegaknya wibawa ummat.

Karakteristik ini di dasarkan atas firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ. تَقُومُونَ بِإِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Gema Risalah Press Bandung, 1992), hal. 437.

وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذْرَا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan (kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga "And. Itulah keberuntungan yang besar. (Q.S. Ash-Shaff, 10-12).⁵³

Pengurus Partai sebagai komunikator partai mempunyai peranan penting dalam segala aktivitas politik dan perkembangan partai. Oleh karena itu seorang pengurus partai harus memenuhi berbagai syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat formal yang harus dipenuhi yaitu: tidak kurang dari 25 tahun; telah menjadi anggota ahli partai; berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa; jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan; serta memiliki pengetahuan politik yang memungkinkannya melaksanakan tugas.⁵⁴

Penulis membagi tiga golongan yang biasa menjadi komunikator da'wah politik dalam Partai Keadilan yaitu mereka yang duduk di lembaga supra struktur (legislatif), para fungsionaris partai yang duduk di lembaga struktural kepengurusan partai, dan para pakar dan tokoh sebagai simpatisan

⁵³ . *Ibid.*, hal 929.

⁵⁴ . Sekilas Partai Keadilan, *Ibid*, hal. 81.

partai yang mempunyai keterikatan ideologis. Ketiga kategori tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi masih dalam satu kerangka tujuan partai.

2. Saluran Komunikasi Da'wah Politik Partai Keadilan

Dalam menyampaikan pesan-pesan da'wah politiknya, Partai Keadilan DPW DIY biasa mempergunakan berbagai sarana dan media tersedia. Diantara media yang biasa dipergunakan antara lain *Pertama*, saluran komunikasi massa yaitu melalui forum formal biasa dilakukan secara intern. Yaitu kegiatan dalam bentuk temu kader antara fungsionaris DPW Partai Keadilan dengan sejumlah massa dan simpatisan Partai Keadilan. Wilayah yang biasa menjadi tempat temu kader tersebut meliputi wilayah DPD Kab. Kodya, DPD Kab. Sleman, DPD Kab. Kulonprogo, DPD Kab. Bantul, dan DPD Kab. Gunung Kidul. Sifat komunikasi da'wah dalam bentuk ini digunakan untuk menampung berbagai aspirasi politik yang dikehendaki oleh massa bawah (*grass root*).

Disamping forum internal partai, forum eksternalpun biasa diikuti partai. Media ini sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi dan silaturahmi antar partai. Forum-forum eksternal yang telah diikuti Partai Keadilan adalah forum aliansi partai-partai Islam, forum silaturahmi antar partai⁵⁵, komunike

⁵⁵ lihat *Koran Kedaualatan Rakyat*, tanggal 23/10/1998

bersama⁵⁶, baik karena terikat dengan *stambus accord* antar partai Islam maupun karena kesamaan visi dan kepentingan. Forum eksternal lainnya seperti dialog partai, diskusi politik juga sering sarana komunikasi politik partai. Namun sarana eksternal ini hanya sebatas partisipasi partai dengan organisasi yang lainnya.

Kedua, media yang sering menjadi sarana komunikasi politik Partai Keadilan adalah media interpersonal. Hubungan interpersonal ini dilakukan melalui jaringan silaturahmi dan berbagai kunjungan yang dilakukan oleh Pengurus Partai dengan berbagai komponen partai termasuk dengan masyarakat. Silaturahmi yang dimaksud adalah apabila seorang kader bertemu dengan kader yang lainnya dan membicarakan berbagai persoalan politik partai.⁵⁷ Ini menunjukkan bahwa kader Partai Keadilan mempunyai *interest* yang tinggi terhadap fenomena politik partai. Kunjungan-kunjungan Partai juga dipergunakan sebagai sarana sosialisasi partai terhadap masyarakat. Apakah itu yang dilakukan oleh anggota legislatif yang juga mewakili partai atau pengurus partai sendiri. Kegiatan kunjungan politik biasanya dilakukan secara rutin yaitu kurang lebih 1 bulan sekali.

Ketiga, saluran komunikasi organisasi dilakukan baik dengan mempergunakan sarana lisan maupun sarana tulis. Sarana lisan yang menjadi

⁵⁶ . lihat *Koran Keadulatan Rakyat*, tanggal 27/2/1999.

⁵⁷ *Hasil Wawancara* dengan Bapak Cahyadi Takariawan S.si., A.Pt. di Sekretariat Partai Keadilan DIY, tanggal 3 Maret 2001.

kebijakan Partai yaitu program rutin pertemuan antara Pengurus Harian DPW dengan Pengurus DPD yang dilakukan setiap 2 pekan sekali. Disamping itu juga rapat-rapat DPW yang juga biasa dipergunakan untuk membahas berbagai persolan internal Partai. Sedangkan media tulis yang dipergunakan dengan menggunakan media surat dan mass media seperti Jurnal Wacana (jurnal resmi Partai Keadilan DPW DIY), koran-koran serta majalah. Penggunaan media tulis dilakukan apabila pesan-pesan dan berbagai kebijakan politik (pemikiran politik, seruan politik, sikap politik, dan *banyanat* politik) partai dirasa perlu untuk diketahui oleh khalayak luas terutama kader partai.

3. Materi Dakwah Politik Partai Keadilan DPW DIY

Dalam melakukan aktivitas da'wah politiknya Partai Keadilan telah menentukan berbagai pemikiran da'wah politiknya. Diantara bidang yang dijadikan materi da'wah antara lain bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial, dan IPTEK.

1. Politik dan Hukum

Gagasan-gagasan politik dan hukum yang dibangun Partai Keadilan antara lain: (1) Terbentuknya pemerintahan yang bersih berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan universal sehingga tercipta sebuah masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan agama dalam seluruh tata kehidupan masyarakat; (2) Tercapainya tujuan-tujuan negara dan terbangunnya sistem

kehidupan politik yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan, dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negeri; (3) Terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa, terpeliharanya keutuhan dan integritasnya; (4) Terwujudnya kebebasan beragama, berpendapat, bersyarikat, dan kebebasan dalam melaksanakan segala bentuk tradisi yang tidak bertentangan dengan akhlak mulia bagi seluruh rakyat, serta meratanya kebebasan bagi semua kelompok masyarakat dalam menetapkan urusannya, memilih wakil-wakil dan pemimpin serta pengawasannya, terbinanya kepercayaan terhadap mereka, terselenggaranya nasihat, kritik, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta terjaminnya kehormatan rakyat dari tindakan pelecehan; (5) Kokohnya prinsip musyawarah dan terlaksananya prinsip-prinsip universal demokrasi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai mulia dalam rangka menjamin berlangsungnya kekuasaan secara damai; (6) Terlaksananya sistem dan administrasi yang teratur dengan penerapan manajemen modern yang efektif yang didasari kewibawaan, kejujuran, amanah, kemampuan, pengalaman, dan mekanisme kontrol yang baik yang melahirkan pemerintah yang bersih dari penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme; (7) Terwujudnya prinsip pemisahan kewenangan, keadilan, dan reformasi peradilan serta terjaminnya independensi dan kekuasaan, kewibawaan, dan kredibilitas aparat hukum sehingga rakyat merasa aman di hadapan hukum; (8) Terbentuknya Angkatan Bersenjata yang kuat

dalam keimanan, ketaqwaan, pengorbanan dan tanggung jawab yang memiliki keterampilan tinggi, wawasan yang luas, dan ketahanan juang yang prima, serta tersedianya logistik, materi, dan industri persenjataan sehingga mampu menunaikan perannya dalam menjamin keamanan dan ketertarikan masyarakat, membela kehormatan bangsa, melindungi negara, kesatuan dan persatuan bangsa, serta kedaulatan dan kemerdekaannya; (9) Terciptanya politik luar negeri yang bebas aktif dan seimbang melalui hubungan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, negara-negara Islam dan negara sahabat lainnya serta memberi dukungan kepada semua bangsa yang tertindas.

Dari 9 agenda politik Partai Keadilan di atas, nampaknya Partai Keadilan ingin mengembangkan sistem demokratisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai universal, keadilan, dan persamaan hak. Bahkan lebih mengarah pada modernisasi politik Islam yaitu sebagai upaya menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial, dan politik Islam dan segala bidang. Ini telah menegaskan bahwa garis politik bahwa Partai Keadilan menolak terjadinya sekularisasi politik yang selama ini terjadi di dunia Barat dan sebagian dunia Islam.

Dalam mengembangkan modernisasi politik Islam, langkah yang terpenting adalah menegaskan eksistensi politik ummat diantara ummat yang lainnya. Ummat Islam tidak akan menjadi penonton dan objek politik orang lain tetapi akan menjadi penentu arah kebijakan bangsa ke depan. Ini

yang menjadi keteguhan orang-orang Partai Keadilan sehingga mereka memasuki pada dunia politik.

Wacana politik yang dikembangkan Partai Keadilan DPW DIY adalah dengan memunculkan gerakan modernisasi politik Islam sebagai upaya memperkuat eksistensi ummat. Rujukan politik yang dianut yaitu dengan mengikuti sistem kekhalifahan sebagai sistem pemerintahan sebagaimana diwariskan oleh Rosulullah SAW dan Khalafaurrsyidin.⁵⁸ Disamping itu juga partai harus dijadikan *madrasah politik* bagi masyarakat bukan ajang untuk mencari kekuasaan.

Modernisasi prilaku politik Partai Keadilan ditunjukkan dengan menentukan metode dalam pemilihan calon Ketua DPW Partai Keadilan untuk periode 2001-2005 yaitu dengan menggunakan sistem partisipasi arus bawah. Seorang calon ketua DPW Partai Keadilan haruslah didukung oleh simpatisan dan anggota Partai Keadilan. Maka pemilu ala partai Keadilapun dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2001 untuk memilih calon ketua yang nantinya akan diputuskan melalui Musyawarah Wilayah.⁵⁹

⁵⁸ . *Seri Pendidikan Politik Ummat Islam 2*, hal. 2.

⁵⁹ *Wawancara* dengan Cahyadi Takariawan, S.Si., Apt. di Sekretariat DPW Partai Keadilan, tanggal 3 Maret 2001

2. Ekonomi

Agenda besar Partai Keadilan dalam bidang ekonomi yaitu mengembangkan kemandirian ekonomi partai, menumbuhkan perekonomian yang berbasis pada potensi ummat (baik SDM maupun SDA). Maka misi yang emban adalah mengusung ekonomi syari'ah sebagai sistem alternatif.⁷⁰ Untuk mencapai visi dan misi tersebut berbagai strategi ditetapkan antara lain: partisipasi (mendorong tumbuhnya gagasan/inisiatif dari bawah); kemitraan, menumbuhkan usaha secara bersama dan menjalin relasi sebagai mitra swasta; memanfaatkan secara positif program-program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi; dan mengembangkan jaringan bisnis kader.

Diantara prinsip-prinsip ekonomi yang dikembangkan adalah (1) Lahirnya struktur ekonomi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil; (2) Terselenggaranya langkah-langkah pengembangan ekonomi bagi proyek-proyek industri produktif yang tidak bergantung pada dunia luar; (3) Tegaknya pilar-pilar ekonomi nasional yang berorientasi kepada sektor khusus yang memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, sebagai wadah yang terbuka dan mudah menampung partisipasi bagi setiap warga negara; (4) Tercukupinya masalah pangan bagi rakyat dan sarana-sarananya melalui

⁷⁰. *Perencanaan Strategis Deputy Ekuin*, Partai Keadilan DPW DIY 1999-2001, hal 1.

pengembangan bidang pertanian, kekayaan laut dan hewani, serta pengembangan lembaga-lembaga penyuluhan profesional bidang pertanian; (5) Berdirinya proyek-proyek industri berorientasi ekspor dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, seperti minyak dan pertambangan, dan terdistribusikan modal secara adil keseluruh wilayah untuk membangun fasilitas-fasilitas fisik dan peningkatan keahlian guna pengembangan industri kerajinan dan industri kecil; (6) Terdayagunakannya seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai karunia Allah dalam pengembangan perusahaan-perusahaan yang melibatkan partisipasi masyarakat tertentu, melalui pemerataan kesempatan dan kemampuan rakyat untuk memperoleh modal kerja; (7) Terdayagunakannya sumber-sumber keuangan umum seperti pajak, zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber-sumber kekayaan negara kepada seluruh wilayah dan daerah.

Dalam bidang ekonomi, Partai Keadilan baru hanya sebatas melakukan penyadaran tentang pentingnya daya saing dan kemandirian ekonomi ummat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannyapun baru sebatas pelatihan-pelatihan kewirausahaan (*enterpreuneurship*) yang mengarah pada ekonomi kerakyatan.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Diantara fokus perhatian Partai Keadilan adalah (1) melakukan reorientasi pendidikan terpadu, memprluas penyelenggaraan wajib belajar

pendidikan melalui peningkatan status hukum, mobilitas fasilitas fisik dan sukarelawan pendidikan serta meningkatkan motivasi pendidikan dikalangan masyarakat; (2) Meningkatkan tindakan afirmasi yang menyangkut profesionalitas, integritas, dan penghargaan dalam rangka mengembalikan peran guru sebagai anasir kunci dalam pendidikan dan pembangunan bangsa; (3) Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga mencapai taraf yang seimbang dengan kebutuhan pemecahan problema sumber daya manusia dalam pembangunan Indonesia masa depan; (4) Mewujudkan wibawa pendidikan nasional melalui evaluasi berkesinambungan terhadap aspek konsepsional dan oprasional sistem pendidikan nasional dalam berbagai jenis jalur dan jenjang dalam rangka menggali potensi bangsa dan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang semakin mengglobal; (5) Mengokohkan peran pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam segenap aspek kehidupannya. Upaya ini mencerminkan kesungguhan menempatkan pendidikan sebagai punggung pencapaian masa depan Indonesia yang beradab.

Bidang pendidikan menjadi garapan yang sangat serius bagi Partai Keadilan. Konsep yang ditetapkan berupa upaya melakukan pembentukan da'wah kampus dan da'wah sekolah yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan memantau aktivitas da'wah dikalangan mahasiswa dan pelajar yang merupakan sebagian besar kader partai. Objek yang

menjadi da'wah sekolah adalah SMU/Sederajat di wilayah Yogyakarta. Disamping itu juga Partai Keadilan membentuk Biro Pemuda Lingkungan yang bertugas melakukan pengkajian terhadap segmentasi da'wah pemuda lingkungan dan skala prioritasnya, melakukan pengkajian terhadap kemungkinan berdirinya Ormas Gerakan Pemuda Keadilan (Garda Keadilan) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bidang Sosial dan Keagamaan

Dalam bidang sosial keagamaan Partai Keadilan akan mengupayakan program-program yang mengarah pada: (1) Terpeliharanya kebersihan moralitas masyarakat melalui penanaman nilai-nilai akhlaq mulia pemahaman tujuan-tujuan hukum dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan, merealisasikan kewajiban kasih sayang dan persaudaraan, adat dan kebiasaan yang terpuji, serta melindungi masyarakat dan melakukan rahbilitasi masyarakat terhadap korban penyakit sosial; (2) Terbentuknya keluarga sebagai pilar bagi struktur masyarakat dengan memperkuat jalinannya, dan menyantuni para faqir dan miskin, memberikan perhatian terhadap peran sosial politik wanita yang sejalan dengan norma dan hukum, menggalakan pembinaan pemuda dengan mengerahkan seluruh sarana pembinaan, dan mengutamakan kerja-kerja profesional dan berbagai keterampilan untuk mewujudkan kehidupan mulia, kebahagiaan dan kesejahteraan umum; (3) Tersebarinya semangat empati, tolong menolong dan solidaritas sosial bagi seluruh warga melalui

pengembangan dan pemerataan santunan sosial dan kesehatan serta memperhatikan kepada pelayanan-pelayanan kebutuhan pokok, memelihara lingkungan, dan melindungi masyarakat dari bahaya polusi.

Meteri-materi dalam bidang sosial, Partai Keadilan DPW DIY telah melakukan berbagai program-program kemasyarakatan. Diantara program unggulannya adalah Pos Keadilan (menetap dan tidak menetap). *Pertama* Aksi sosial penggalangan dana dan pakaian pantas pakai untuk kerusuhan Ambon dan sekitarnya yang kemudian disumbangkan kedaerah bencana. *Kedua* pada saat terjadi bencana di Kab. Kulonprogo Partai Keadilan juga membuat Pos Keadilan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Kepedulian Partai Keadilan terhadap berbagai persoalan ummat, membuat Partai harus melakukan upaya-upaya meringankan beban mereka.

Dalam menyambut bulan syawal Partai Keadilan juga telah mengadakan program Pekan Peduli Keluarga dan Masyarakat (PPKM). Program ini didasarkan bahwa secara tradisi kunjungan atau silaturahmi antar famili (sanak keluarga) setelah bulan Ramadhan biasa dilakukan oleh masyarakat. Maka tradisi ini adalah sarana efektif dalam penyampaian da'wah fardiyah. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.(Q.S. An-Nisa:36)"⁷¹

Dalam menyambut idul qur'ban, Partai Keadilan juga menyampaikan pesan-pesan da'wah berupa himbauan-himbauan keagamaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas. Isi dari himbauan tersebut, diantaranya mengenai tuntunan umum di bulan Dzulhijjah masyarakat dihimbau untuk memperbanyak amal shaleh, berpuasa di tanggal 9 dzulhijjah, mengucapkan kalimah-kalimah takbir, tahlil, dan tahmid ba'da subuh dari tanggal 9-13 dzulhijjah, menunaikan shalat 'Id di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dalam melaksanakan shalat Idul Adha masyarakat dihimbau untuk mengikuti ajaran Islam seperti: memakai wangi-wangian, tidak makan sebelum shalat, melewati jalan yang berbeda antara pulang dan pergi, serta mengucapkan tah-niah. Seruan untuk melaksanakan qur'ban bagi yang mampu beriku tata-caranyapun disampaikan.

5. Bidang Kesehatan

Partai Keadilan dalam bidang kesehatan akan melakukan program-program kesehatan yang berprinsip pada asas keadilan dan pemerataan.

⁷¹. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Ibid.*, hal. 123.

Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain: (1) mengupayakan agar aspek kebijakan dan strategi kesehatan senantiasa harus ditujukan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, pemerataan, efisiensi dan kesinambungan; (2) mengupayakan desentralisasi kebijakan operasional administratif dan manajemen. Hal tersebut dipergunakan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan yang pro-aktif terhadap permasalahan kesehatan, memiliki otoritas serta mengutamakan konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya; (3) Mengupayakan terwujudnya perubahan paradigma orientasi pemeliharaan kesehatan dari kuratif ke arah promotif dan preventif bagi seluruh lapisan masyarakat; (4) Mengupayakan agar program derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi kepentingan pemerintah dan providen saja, tetapi harus berorientasi pada hak dan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat serta kemandirian upaya pelayanan kesehatan masyarakat; (5) Mengupayakan agar pembinaan sumber daya manusia selalu diarahkan pada: a. Upaya merekrut dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas; b. peningkatan profesionalisme dan mentalitas; c. pemerataan penyebaran sesuai dengan kondisi objektif kebutuhan dilapangan; (6) Mengupayakan agar perluasan dan peningkatan kualitas industri kesehatan diorientasikan ke hulu untuk menciptakan bahan baku dan alat kesehatan dengan mengutamakan pada

kemandirian, pengawasan, efisiensi sesuai dengan keperluan dalam bidang pembangunan kesehatan.

Dalam bidang kesehatan Partai Keadilan telah melaksanakan program-program penyuluhan kesehatan bagi masyarakat, pelayanan kesehatan murah, konsultasi kesehatan dan gizi, serta pengobatan murah dan gratis. Program ini dilakukan bersamaan dengan program-program sosial dengan diberi nama Pos Keadilan. Program ini bersifat menetap yang dilakukan secara periodik.

6. Bidang IPTEK

Tercapainya optimasi pemanfaatan, pengembangan, penguasaan IPTEK dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor riil serta menumbuhkan fundamental ekonomi yang kuat. Oleh karena itu secara tematik Partai Keadilan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Terintegrasikannya IPTEK dalam industrialisasi dalam rangka mendorong industri substitusi impor dan pengembangannya melalui peningkatan nilai tambah (SDM dan IPTEK) menjadi berorientasi ekspor; (2) Tumbuhnya tekno-struktur (SDM, lembaga, Informasi dan perangkat) secara mantap dalam rangka mendukung industri; (3) Tumbuh-kembangnya budaya IPTEK dalam masyarakat dan iklim yang baik bagi SDM IPTEK dalam rangka melaksanakan program IPTEK secara konsisten untuk mencapai manfaat optimal serta tumbuhnya IPTEK sesuai indikator-indikator standar

melalui sistem evaluasi yang mantap sehingga memberikan sumbangan optimal bagi pembangunan.

Dalam bidang IPTEK Partai keadilan baru sebatas memberikan penyuluhan-penyuluhan ilmiah. Dianataranya, Pelatihan penyusunan proposal penelitian, kelompok diskusi IPTEK, dan berbagai kegiatan lainnya.

Dari berbagai materi dan garapan da'wah politik di atas, maka pesan moral sebenarnya yang lebih ditonjolkan oleh Partai Keadilan. Karena secara sistematis materi-materi da'wah politik dilakukan dengan bentuk *da'wah bil hal*, sebagaimana ketetapan mereka sejak awal ketika memasuki partai politik.⁷²

4. Khalayak Partai Keadilan DPW DIY

Dalam kasus komunikasi da'wah politik yang terjadi dalam tubuh Partai Keadilan, ada dua golongan yang dapat dikategorikan sebagai khalayak atau objek da'wah politik. *Pertama*, anggota masyarakat yang secara resmi menjadi anggota Partai Keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART BAB II, pasal 9) sebagai berikut:

1. Anggota Pemula yaitu mereka yang sedang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang.
2. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar 1.

⁷² . lihat *Koran Kedaulatan Rakyat*, tanggal 27/2/1999.

3. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar 2.
4. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
5. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
6. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
7. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai yang dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.⁷³

Pengkategorian di atas hanya sebatas mengikuti aturan formal yang ada dan berlaku dalam Partai Keadilan. Tetapi juga apabila ditinjau dari tingkat partisipasi politik, maka secara sederhana keanggotaan Partai Keadilan dapat dibagi pada dua bagian, *pertama* adalah mereka yang intensitas penuh mengikuti berbagai aktivitas dan program-program partai dan *kedua* adalah mereka anggota yang pasif yang hanya mengikuti kegiatan sewaktu-waktu.

Kedua, adalah masyarakat luas yang dalam keadaan dan waktu tertentu dapat menjadi objek da'wah politik. Sifat dari kategori ini yaitu komunikasi politik terjadi apabila adanya "kepentingan" dan kebutuhan dari kedua belah pihak, antara komunikan dan khalayak. Kepentingan dan kebutuhan dalam artian bahwa pesan-pesan da'wah disampaikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga hal itu harus diinformasikan oleh Partai

⁷³ . Anggaran Dasar Partai Keadilan Dalam, *Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta:DPP Partai Keadilan, 1998), hal. 65.

Keadilan. Dalam kelompok kedua ini ada sebagian masyarakat yang mengikuti perkembangan partai secara kontinue yang biasa disebut partisipan partai. Kelompok ini biasanya masih punya ikatan ideologis tetapi tidak mau masuk pada wilayah politik.

b. Bentuk-Bentuk Komunikasi Politik Partai Keadilan DPW DIY

1. Propaganda Da'wah Politik

Dalam tradisi politik Partai Keadilan, teknik propaganda digunakan dalam rangka mengejar tujuan jangka panjang. Yaitu munculnya kekuatan ideologis diantara sekian banyak anggota masyarakat. Sehingga akan memperkuat posisi partai dari berbagai ideologi politik yang berkembang dalam masyarakat.

Ada berbagai program politik Partai Keadilan yang dapat dikategorikan sebagai propaganda politik. Antara lain program Training Kader Partai, Training Orientasi Partai (TOP), dan Ta'lim rutin Partai (TRP).⁷⁴

Training Kader dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkokoh sumber daya manusia dengan terget pada pencapaian dan peningkatan kader profesional. Karena Partai Keadilan sampai sekarang masih menganggap

⁷⁴ . LPJ, *Ibid.*, hal. 16.

partai kader bukan partai massa.⁷⁵ Masuk dalam program ini antara lain *Daurah Pembina, Tarbiyah Tsaqafiyah*, dan Latihan Kepemimpinan yang diperuntukan bagi pembina dan fungsionaris. Materi-materi yang disampaikan dalam program tersebut berisikan tentang sisi-sisi politik kontemporer, *sumulatul Islam*, wawasan politik Islam yang dipandang secara universal.

Upaya propaganda politik sebagai program unggulan ini telah menghasilkan 4727 kader partai yang solid. Ukuran lain keberhasilan program-program ini adalah adanya tingkat interkasi antara kader dengan Islam sebagai tolak ukur yang sangat fundamental disamping ukuran kuantitas yang telah dicapai.

Training Orientasi Partai diperuntukan bagi komponen masyarakat yang mempunyai ketertarikan terhadap visi-misi Partai Keadilan. Program ini sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi Partai Keadilan yang sesungguhnya terhadap masyarakat. Sedangkan Ta'lim Rutin Partai (TRP) dalah program rutin bulanan dan mingguan yang dilakukan secara kontinue untuk membahas tema-tema politik aktual. Apakah menyangkut sikap partai atau menyangkut kondisi bangsa dan negara. Media ini sebagai upaya untuk menambah wawasan anggota mengenai berbagai hal.

Dari ketiga bentuk propaganda politik tersebut, menurut hemat penulis Partai Keadilan baru melakukan upaya internal partai sehingga opini yang

⁷⁵ . *Wawancara* dengan Bapak Cahyadi Takariawan, S.Si., Apt. di Sekretariat DPW Partai Keadilan tanggal 3 Maret 2001.

berkembang dimasyarakat tentang partai ini masih belum mendapat tempat secara maksimal. Secara mayoritas kelompok masyarakat yang “mengetahui” partai ini dapat dikatakan dari kelompok “menengah” yang secara historis masih mempunyai keterikatan ideologis keagamaan. Upaya tersebut adalah suatu hal yang wajar di mana Partai Keadilan adalah partai yang baru yang berupaya untuk mempertahankan jati dirinya diantara partai-partai Islam lainnya.

Komitmen sebagai partai kader inilah yang telah menyebabkan timbulnya kesan eksklusif partai, hal ini terjadi karena masyarakat kita telah terbiasa dengan gaya partai atau organisasi terbuka. Upaya-upaya partai untuk menampung mereka yang memiliki minat terhadap partai melalui jalur-jalur luar, tidak melalui perkaderan belum bisa menutupi animo masyarakat tentang eksklusivitas partai ini. Tentunya ini akan menjadi kendala besar bagi eksistensi apabila dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Persuasi Da'wah Politik

Program unggulan Partai Keadilan yaitu program *Direct Selling*, telah membawa partai ini pada posisi siap bersaing dengan partai-partai lain dalam menghadapi pemilu. Partisipasi kader dalam program ini juga membawa akselerasi sosialisasi partai terhadap publik. Hal ini tentunya sangat menguntungkan, terutama dari segi pendanaan kampanye dapat meringankan partai yang ternyata memang *high cost*.

Persuasi politik Partai Keadilan biasanya dilakukan ketika akan menghadapi proses Pemilihan Umum (PEMILU). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dan partisipasi politik masyarakat.

Program lain yang dapat dikategorikan persuasi politik yaitu kampanye politik baik melalui mobilisasi massa maupun melalui media lisan. Bentuk kampanye dengan menggunakan mobilisasi massa dengan melakukan konvoi kendaraan bermotor telah menjadi tradisi budaya masyarakat Indonesia termasuk Partai Keadilan. Namun konvoi simpatik warga Partai Keadilan DIY dilakukan dengan tertib dan mengikuti peraturan lalu lintas.⁷⁶ sedangkan media tertulis yang dipergunakan sarana kampanye politik antara lain: penerbitan jurnal Partai Keadilan (wacana), selebaran tentang jati diri Partai Keadilan, 5 cara memilih partai, apa kata mereka tentang Partai Keadilan, 10 alasan memilih Partai Keadilan, serta surat terbuka bagi masyarakat Yogyakarta.⁷⁷

3. Tabligh Akbar sebagai Bentuk Da'wah Politik

Tabligh Akbar sebagai bentuk komunikasi politik telah menjadi rutinitas politik Partai Keadilan. Bentuk komunikasi da'wah ini dipergunakan ketika masa-masa kampanye atau masa penyambutan bulan kelahiran partai.

⁷⁶. lihat *Koran Kedaulatan Rakyat*, hari sabtu tanggal 19/12/1998.

⁷⁷. LPJ, *Ibid.*, hal. 14.

Pada masa kampanye tabligh akbar disampaikan oleh tokoh-tokoh ✓ kharismatik partai yang dilakukan secara monologis. Bentuk da'wah politik ini sebagai upaya untuk mempengaruhi dan memperteguh konstituen dalam memilih partai.

Tabligh akbar yang dilaksanakan seperti ketika dideklarasikannya Partai Keadilan DPW DIY tanggal 8 September 1998 yaitu dengan menghadirkan Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, MSc. (Presiden Partai Keadilan). Kegiatan ini bertempat di lapangan terbuka (seperti Kridosono dan Alun-alun utara) dengan menghadirkan sejumlah simpatisan dan anggota partai. Materi yang disampaikan berisikan berbagai sikap dan pandangan partai terhadap berbagai persoalan umat. ✓ *ulaul*

4. Periklanan Da'wah Politik

Periklanan politik Partai Keadilan biasanya dilakukan ketika akan melaksanakan berbagai program-program politik partai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat luas.

Periklanan politik yang dilakukan Partai Keadilan biasanya dengan menggunakan sarana *mass media* seperti koran Kedaulatan Rakyat dan Bernas ataupun juga menggunakan sarana selebaran-selebaran yang resmi dikeluarkan oleh Pengurus Partai Keadilan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah diadakan beberapa uraian dan analisis mengenai Komunikasi Da'wah Politik Islam yang dilakukan oleh Partai Keadilan DPW Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsu-unsur komunikasi da'wah politik Partai Keadilan yaitu: *pertama* sumber atau komunikator da'wah politik Partai Keadilan adalah mereka para pengurus Partai Keadilan DPW DIY yang memiliki karakteristik idiologis *moralis, profesional, patriotik, moderat, demokrat, reformis, dan independen.* ✓
Namun yang dominan mencolok dari aktivitas keseharian mereka adalah prilaku-prilaku yang mencerminkan *akhlaqul karimah*, semangat juang tanpa pamrih dalam menjalankan tugas-tugas partai serta dominasi kaum intelektual (para sarjana muslim) mempunyai akar historis dalam gerakan da'wah kampus. *Kedua*, media atau saluran komunikasi da'wah yang dipergunakan adalah sarana komunikasi massa dengan menggunakan forum-forum formal internal partai yang melibatkan massa dan juga forum-forum eksternal; komunikasi interpersonal dengan menggunakan sarana *silaturahmi* dan kunjungan partai; serta saluran komunikasi organisasi yaitu dengan menggunakan media tulis dan media lisan. *Ketiga*, Bidang yang menjadi garapan da'wah Politik Partai Keadilan meliputi bidang politik dan hukum,

bidang sosial-keagamaan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesehatan dan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dalam bidang politik wacana yang diangkat oleh Partai Keadilan adalah wacana modernisasi sistem politik Islam; dalam bidang ekonomi menerapkan ekonomi syar'ah dan ekonomi yang berbasis kerakyatan; bidang pendidikan dan kebudayaan (yang dalam istilah Partai Keadilan) dengan menggunakan konsep da'wah sekolah dan da'wah kampus; dalam bidang sosial keagamaan adalah upaya penumbuhan moralitas dan kesalehan sosial dalam aktivitas keseharian masyarakat, dalam bidang kesehatan dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan kesehatan; serta dalam bidang IPTEK adalah dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. *Ke-empat*, yaitu kondisi objektif khalayak Partai Keadilan dapat dikategorikan dalam dua kriteria yaitu anggota dan simpatisan partai serta masyarakat luas yang punya kepentingan terhadap berbagai program-program politik partai.

2. Bentuk-bentuk komunikasi da'wah politik yang dipergunakan antara lain propaganda politik dalam bentuk kegiatan Training Orientasi Partai (TOP), Ta'lim Rutin Partai (TRP), training kader, *daurah pembina*, *tarbiyah tsaqafiah* yang telah menghasilkan sejumlah 4727 kader potensial. Persuasi politik dilakukan dalam bentuk program *Direct Selling* dan kampanye politik yang melibatkan sejumlah massa besar. Ketiga, tabligh akbar yang juga telah dipergunakan oleh Partai Keadilan sebagai bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan ketika akan menghadapi masa-masa PEMILU) atau memperingati

kelahiran partai. Bentuk periklanan politik dilakukan hanya sebatas publikasi kegiatan-kegiatan partai.

B. Saran-Saran

Bahwa da'wah sebagai bentuk transformasi ajaran Islam haruslah difahami secara integral dan menyeluruh dalam pengaplikasian dan pengejawantahannya. Termasuk dalam melakukan aktivitas politik ketatanegaraan dan politik keummatan. Da'wah tidak dapat dipisahkan dalam sebuah sistem politik, tetapi da'wah politik sampai saat ini tampaknya belum mempunyai *setting* yang jelas. Bukti yang kuat adalah isu politisasi agama dengan bentuk da'wah politik masih menjadi hal yang tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, sekarang bagaimana membentuk opini dimasyarakat agar terjadinya citra positif mengenai *da'wah politik* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Munsyi, *Metode Diskusi dalam Dakwah*, Surabaya, Al-Ikhlash, tth.
- Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, Yogyakarta, SIPRESS, 1993.
- Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- A.H. Hasanuddin, *Rhetorika Da'wah dan Publisistik dalam Kepemimpinan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Amal Fathullah, *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998.
- Chalid Mahmud, *Laporan Pertanggungjawaban DPW PK DIY Periode 1999-2001*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. II, 1989.
- Edward Depari dan Calvin Mac Andrews (ed.), *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan* Yogyakarta, Gajah Mada University Press, cet. VII, 1998.
- E. S. Anshari, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam*, Jakarta, Penerbit Usaha Interprises, 1976.
- Esposito, Jhon L, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.
- Hairus Salim HS, (Peny.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta, LKis, 1999.
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan cet. IX., 1996.
- M. Hafi Anshori, *Pemahaman dan Pengamalan Tentang Da'wah*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1993.

- Nasruddin Harahap CS., *Dakwah Pembangunan*, Yogyakarta, DPD Golongan Karya, 1992.
- Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.
- Idi Subandy Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1997.
- Iman Nugraha (ed.), *Sikap Kami*, Jakarta:DPP Partai Keadilan 2001.
- Maftukin, *Politik dan Dakwah (Studi Tentang Aktivitas GOLKAR dalam Dakwah Islamiyah)*, Skripsi: 1996.
- Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1982.
- Nasrun (ed.), *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Nimmo, Dan *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung, PT Remadja Rosda Karya, 1999.
- Nimmo, Dan *Komunikasi Politik, Khalayak dan Effek*, Bandung, PT Remadja Rosda Karya, 1989.
- Novel Ali *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung, Remadja Rosda Karya, 1999.
- Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Bandung, Remadja Rosda Karya, cet. II, 1992.
- Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- R. Agus Toha Kuswata, dan R.UU. Kuswara Surya Kusumah, *Komunikasi Islam dari Zaman ke Zaman*, Jakarta, Arikha Media Cipta, 1990.
- Sahar L. Hassan dkk. (ed.), *Memilih Partai Islam, Visi, Misi, dan Persepsi* dengan, Jakarta, Gema Insani Press, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1992.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta, Grafiti, 1997.

Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.

_____, *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta, DPP Partai Keadilan 1998.

_____, *Kampanye Tanpa Huru-Hara*, Jurnal ISKI Vol. IV, 1999.

_____, *Jurnal DPW PK Daerah Istimewa Yogyakarta*, Edisi 3/I, 25 Desember 1998 - 8 Januari 1999.

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta, Logos, 1997.

Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung, Tarsita, 1972.

Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama : Yadi Kurniadi
- 2 Tempat, Tgl. Lahir : Cimerak, 11 April 1977
- 3 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4 Agama : Islam
- 5 Alamat di Yogyakarta : Jl. Veteran Warungboto UH IV/756 Yogyakarta
- 6 Pendidikan : a. Tk Harapan Sindangsari
b. SDN Sindangsari lulus tahun 1990
c. MTs YPK Cijulang lulus tahun 1993
d. MAN Darussalam Ciamis lulus tahun 1996
e. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 7 Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Kusnadi
 - b. Ibu : Hopsah
- 8 Pekerjaan : Tani
- 9 Alamat Orang Tua : Jl. Sindangsari No. 122 RT 04/RW 01 Cikijing
Sindangsari Cimerak Ciamis Jawa Barat 46395

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,2001

Penulis.

INTERVIEW GUIDE

MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTAI KEADILAN DPW DIY

1. Kapan Partai Keadilan DPW DIY Didirikan?
2. Bagaimana proses pembentukannya?
3. Bagaimana Struktur Organisasi Partai Keadilan DPW DIY?
4. Visi dan misi seperti apakah yang ingin dibangun Partai Keadilan DPW DIY?
5. Platform politik bagaimana yang ditetapkan Partai Keadilan DPW DIY?
6. Bagaimanakah kondisi keanggotaan Partai Keadilan DPW DIY?

MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN DPW DIY

1. Bagaimanakah kondisi kepengurusan Partai Keadilan DPW DIY?
2. Materi da'wah politik seperti apakah yang telah disampaikan oleh Partai Keadilan DPW DIY?
3. Bagaimana respon khalayak terhadap berbagai kebijakan politik Partai Keadilan DPW DIY?
4. Bentuk-bentuk komunikasi politik seperti apakah yang dipergunakan Partai Keadilan DPW DIY?

5. Media komunikasi politik seperti apakah yang sering dipergunakan Partai Keadilan DPW DIY?
6. Apakah setiap kebijakan partai diketahui oleh mayoritas simpatisan dan pendukung Partai Keadilan?

FOTO KEGIATAN PARTAI KEADILAN DPW DIY



Kegiatan Training Kader Partai Sebagai Bentuk Propaganda Da'wah Politik



Kampanye Simpatik Massa Partai Keadilan DIY Sebagai Upaya Persuasi Politik Terhadap Masyarakat Luas.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856. Yogyakarta

Yogyakarta, 2-2-2001

or : IN/I/PD.I/PP.01.1/0068/2001

d. :

: Permohonan izin penelitian

Kepada Yth.

Gubernur KIH UP. Kepala Bappeda
dan Kaditsospol
Propinsi DIY
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

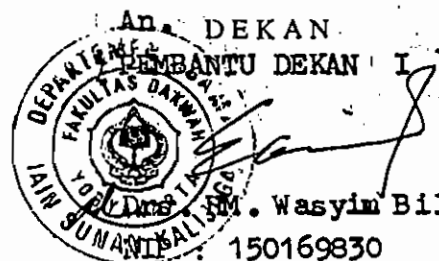
Untuk bahan penulisan skripsi / thesis, dengan hormat bersama ini kami mohon izin mengadakan riset / penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : YADI KURNIADI
No. Induk : 96212144
Semester : X
Jurusan : KPI
Alamat : Jl. Veteran Warungboto UH IV/756 Yogyakarta.
Judul Skripsi : KOMUNIKASI POLITIK ISLAM (STUDI ANALISIS DAKWAH
POLITIK PARTAI KEADILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYA-
KARTA
Metode Penelitian : Interview, Dokumentasi dan Observasi.
Waktu : 9-2-2001 sampai selesai.

Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas izin yang diberikan kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalam.



Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Walikotamadia Wilayah Kodia Yogyakarta.

2. DPW Partai Keadilan Prop. DIY

3. Sdr. Yadi Kurniadi (Mhs. Ybs.).



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 Pes. 176 s/d 181. 563681

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/203

Surat : PD.I Fak. Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : IN/I/PD.I/PP.01.1/
Tangal : 2 - 2 - 2001 Perihal : Ijin Penelitian 0068/2001
ingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapat dan
Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana
Pemberian Ijin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan
Pendataan/ Penelitian.

Surat kepada :

: Yadi Kurniadi

Surat : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

at : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Surat : Mengadakan penelitian dengan judul :

" KOMUNITAS POLITIK ISLAM (STUDY ANALISIS DAKWAH POLITIK PARTAI KEADILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) "

Surat : Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.

Surat : DFW Partai Keadilan Yogyakarta

Surat : Mulai pada tanggal 9 Februari 2001 s/d 9 Mei 2001

Ketentuan :

Sebelum datang menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Wali Kota) untuk
dapat petunjuk seperlunya.

Harus menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

Harus memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Direktorat Sosial
Politik.

Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk keperluan ilmiah.

Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat memberi bantuan seperlunya.

Surat : Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Surat : Kepada Yth.

Gubernur DIY.

Surat : Laporan.

BAPPEDA Propinsi DIY.

Surat : Kepada Yth.

Surat : dan ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

6 Februari 2001

A.N. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Direktorat Sosial Politik

Surat : Ka Subdit Ketertiban Umum



Penata T.K.I NIP. 490023420 1